



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

PENGUMUMAN

NOMOR : 267/PL.02.2-Pu/7410/2024

TENTANG

PENERIMAAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara mengumumkan Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara sebagai berikut:

| NO | NAMA LENGKAP PASANGAN CALON | PARTAI POLITIK PENGUSUL | STATUS (MANTAN TERPIDANA/ TERPIDANA) | HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON / PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON |
|----|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|
| | Drs. H. ABU HASAN, M.Pd | GOLKAR, PKS | TIDAK | MEMENUHI SYARAT |
| | Drs. FAHRUL MUHAMMAD, M.Si | | TIDAK | MEMENUHI SYARAT |
| | AFIRUDIN MATHARA, S.H., M.H | PKB, GERINDRA | TIDAK | MEMENUHI SYARAT |
| | RAHMAN, S.KM., M.Kes | | TIDAK | MEMENUHI SYARAT |
| | MUH. RUKMAN BASRI, S.E | PAN | TIDAK | MEMENUHI SYARAT |
| | HARWIS, S.IP | | TIDAK | MEMENUHI SYARAT |
| | ABDUL SALAM SAHADIA, S.Sos., M.Ap | PDIP, DEMOKRAT, | TIDAK | MEMENUHI SYARAT |
| | AHMAD AFIF DARVIN, S.H | PKN | YA | MEMENUHI SYARAT |

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan atas calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2024 melalui:

1. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur “tanggapan” dengan cara:
 - a. memilih tahapan “Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah”
 - b. memilih kategori “Tanggapan terhadap Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah”
 - c. memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan
 - d. mengisi data identitas pemberi masukan dan tanggapan masyarakat
 - e. mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa:
 - 1) dukungan atas calon dan/atau pasangan calon,
 - 2) masukan dan tanggapan masyarakat terkait: pasangan calon, status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya, dan/atau hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
 - f. menuliskan uraian.
 - g. mengunggah dokumen yaitu: KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.
 - h. menekan “SUBMIT”
2. secara luring ke Gedung Serbaguna KPU Kabupaten Buton Utara dengan alamat di Jl. Poros Ereke – Waode Buri, Kec. Kulisusu, Kab. Buton Utara, penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat secara luring dilakukan dengan cara:
 - a. mengisi daftar hadir.
 - b. mengisi formulir Model TANGGAPAN. MASYARAKAT.KWK.
 - c. menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud huruf b kepada KPU Kab. Buton Utara
 - d. menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2024, KPU Kabupaten Buton Utara mengumumkan visi, misi dan program pasangan calon sebagaimana terlampir.

Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2024 diterima oleh KPU Kabupaten Buton Utara pada tanggal 15 - 18 September 2024.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Buranga
Pada tanggal 14 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buton Utara



Munarsiy

**VISI MISI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BUTON UTARA
PERIODE 2024 – 2029**

Drs. H. ABU HASAN, M. Pd

Drs. FAHRUL MUHAMMAD, M. Si



VISI, MISI DAN PROGRAM CALON BUPATI BUTON UTARA

PENGANTAR

Bismillahi Rahmannirahim

Asslamu alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah Subhana wataallah atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Sebagai calon Bupati Buton Utara maka saya : Berkomitmen untuk mewujudkan kehidupan masyarakat sejahtera, berkelanjutan, berkeadilan, berbudaya, humanis dan religius yang menjunjung nilai budaya *Lipu Tinadeakono Sara* dengan didukung Potensi, Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Kebudayaan.

Materi Visi dan Misi ini memaparkan pelingkupan potensi, masalah dan harapan berdasarkan potret Kabupaten Buton Utara secara umum, sehingga tidak menyajikan hal-hal teknis kualitatif dan kuantitatif normatif tetapi lebih dititik beratkan pada pemetaan Visi dan Misi.

Program-program kerja visi-misi dititik beratkan pada 5 agenda utama, meliputi:

- a) Peningkatan kualitas keagamaan dan moral (revolusi mental)
 - b) Tata Pemerintahan yang baik (Good Government) dan pemerintahan yang bersih (good governance);
 - c) Peningkatan Sumber daya Manusia baik di birokrasi maupun di masyarakat;
 - d) Perekonomian, Kemiskinan, Pendidikan & Kesehatan
 - e) Membangun tata kelola lingkungan yang baik
-

Dengan segala kerendahan hati saya berharap adanya masukan yang bersifat membangun Dan atas kesempatan yang telah diberikan tidak lupa saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

1. PENDAHULUAN

Optimis terpilih sebagai Bupati Buton utara, maka kelak akan berperan menjadi penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan, dituntut mampu mengimplementasikan manajemen pemerintahan secara maksimal. Sebagai Bakal Calon Bupati Buton Utara saat ini harus :

1. Paham bahwa nantinya sebagai penyelenggara pemerintahan dituntut mampu: Menguasai dan memahami posisi strategis Kabupaten Buton Utara dalam satu kesatuan sistem pembangunan wilayah *Lipu Tinadeakono Sara* dengan potensi sumber daya yang memiliki keunggulan kompetitive yang merupakan modal dasar pembangunan berbagai sektor.
 2. Menempatkan diri sebagai putra daerah tulen yang berkomitmen untuk membuktikan : Terwujudnya Buton utara membangun dari, oleh dan untuk masyarakat sehingga sejahtera lahir maupun bathin.
 - a. Membangun tata pemerintahan transparan, akuntabel, berwibawa, efisien dan efektif.
 - b. Mandiri, kompetitif, serta sebagai *agent of change & reform*
 - c. Membangun manajemen pemerintahan berorientasi wirausaha yang *enterpreneurship & reinventing government*.
-

A. ISU-ISU STRATEGIS

Guna ketepatan dalam menetapkan arah kebijakan dan sasaran pembangunan maka perlu diinventarisir permasalahan yang menjadi isu-isu strategis dan yang mendesak untuk diselesaikan yaitu :

1. Terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia pencari kerja, sehingga kalah bersaing, faktor ini menjadi penyebab peningkatan angka pengangguran
 2. Angka kemiskinan diperkirakan sekitar 17,53% atau sebanyak 10.198 orang (BPS, 2024).
 3. Terbatasnya peran masyarakat dan desa / kelurahan dalam penyusunan kebijakan publik termasuk penganggaran dan pengawasan
 4. Rendahnya pelayanan aparat pemerintahan akibat belum efisien dan efektif itas manajemen pemerintahan dan belum terselenggaranya pemerintahan yg didukung birokrasi profesional yang berbasis kompetensi dan kinerja.
 5. Rendahnya daya saing dan kualitas produk pertanian, industri kecil, menengah maupun produk wisata.
 6. Ada kesenjangan pertumbuhan dan pembangunan antar wilayah/ kawasan terutama antara kawasan produksi dengan kawasan industri dan antara kawasan urban dan rural.
 7. Turunnya kualitas dan kuantitas SDA karena kurang optimalnya pengelolaan Sumber daya alam dan Lingkungan hidup.
 8. Terbatasnya sarana prasarana dasar masyarakat di daerah pedesaan (*rural*) seperti fasilitas pendidikan dasar, kesehatan,
-

air bersih, lingkungan permukiman, drainase dan sanitasi, transportasi dan irigasi pertanian.

9. Belum optimalnya penataan sarana dan prasarana perkotaan (*urban*) seperti: jaringan jalan perkotaan, Perbaikan jalan provinsi, drainase dan sanitasi, air bersih, persampah, ruang publik, pertamanan, hutan kota, ruang terbuka hijau, dan sistem transportasi.

B. VISI DAN MISI

1. VISI

Berdasarkan isu strategis/permasalahan dan keterbatasan, maka visi calon Bupati dalam pembangunan 5 tahun ke depan (2025-2030) adalah:

"TERWUJUDNYA BUTON UTARA YG BERBUDAYA DAN RELEGIUS. ADIL DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA."

2. MISI

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabilitas, demokratis, efisien dan efektif.
 2. Meningkatkan SDM unggul, sehat, cerdas dan bermoral melalui pendidikan gratis, kesehatan gratis bagi masyarakat prasejahtera dan pemerataan pembangunan penyediaan fasilitas umum masyarakat.
 3. Meningkatkan perekonomian daerah berdaya saing berbasis industri, pertanian, perikanan, pariwisata dan budaya dengan bersendikan ekonomi kerakyatan.
-

4. Meningkatkan infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan ekonomi kerakyatan.
5. Mengembangkan dan meningkatkan susasana kehidupan masyarakat dengan perbaikan moril, materil, spiritual yang berlandaskan sendi-sendi keagamaan.
6. Percepatan pembangunan perekonomian dengan mendorong pertumbuhan investasi daerah dengan membangun hubungan kerjasama/kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
7. Meningkatkan kesadaran aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUAN

Tercapainya kemajuan daerah dan masyarakat yang sejahtera, berkelanjutan, berkeadilan, diatas nilai-nilai sosial, ekonomi, budaya dan agama yang di ridhoi Allah SWT.

2. SASARAN

Tercapainya hasil pembangunan yang spesifik dan terukur serta bertahap sesuai dengan urutan prioritas dasar RKPD,RPJMD dan RPJPD dalam masa kepemimpinan kedepan meliputi :

1. Tata pemerintahan dan aparatur pemerintahan
 2. Pendidikan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing secara menyeluruh
-

3. Perekonomian daerah berbasis pertanian, perikanan, pariwisata dan budaya.
4. Infrastruktur dasar daerah;
5. Hubungan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat;
6. Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang religius;
7. Tatakelola penataan lingkungan hidup.

3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan ketentuan yg ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi :

1. Menjalankan dan menerapkan regulasi secara murni dan konsekuen;
 2. Melakukan evaluasi pengaruh negatif terhadap penerapan regulasi dan menyusun penyempurnaan secara komprehensif terhadap PERDA yang kurang produktif dan tidak berpihak kepada masyarakat;
 3. Menerapkan kebijakan publik sesuai paradigma pembangunan: kemiskinan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, ekonomi daerah, infrastruktur, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing.
 4. memperluas interaksi pelaku pembangunan dalam rangka menciptakan Good Government dan good governance dan mengoptimalkan 4 pilar pembangunan yg meliputi : Pemerintah(*state*), Masyarakat (*community*), Pengusaha (*private sector*) serta akademisi dan LSM (*NGO*).
-

5. Mengelolaan dan memanfaatkan sumber daya alam dengan dilandasi oleh prinsip-prinsip keberlanjutan (*Sustainability*) dan kelestarian lingkungan hidup.

4. STRATEGI PROGRAM

Merupakan implementasi bagaimana pencapaian tujuan dan sasaran secara operasional yg dituangkan dalam program sistematis dan terpadu untuk merealisasikan visi dan misi berdasar isu-isu strategis, melalui 5 Agenda Pokok :

- a) Agenda mewujudkan Peningkatan kualitas keagamaan dan moral
 - b) Agenda mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (Good Government) dan pemerintahan yang bersih (good governance);
 - c) Agenda mewujudkan Peningkatan Sumber daya Manusia yang baik di birokrasi maupun di masyarakat;
 - d) Agenda mewujudkan peningkatan Perekonomian, penuntasan Kemiskinan, peningkatan layanan Pendidikan dan pelayanan Kesehatan prima.
 - e) Agenda Mewujudkan tata kelola lingkungan hidup yang baik.
-

5. PENJABARAN AGENDA PROGRAM

A. Agenda mewujudkan Peningkatan kualitas keagamaan dan moral.

1. Penataan kelembagaan SARA dan perangkat adat melalui

:

- a. Peningkatan fungsi lembaga adat/Sara dan keagamaan
 - b. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan melalui pendidikan budaya lokal ke butonan.
 - c. Peningkatan kesejahteraan pegawai Sara, imam, dan guru ngaji.
- #### **2. Peningkatan sarana dan prasarana ibadah dan pesantren.**
- a. Rehabilitasi dan pembanguinan tempat-tempat ibadah.
 - b. Pembangunan gedung islamic centre
 - c. Pembangunan sekolah Hafis Qur'an dan peningkatan saran prasana pesantren.
- #### **3. Peningkatan fungsi forum antar umat beragama.**
- a. Mengakomodasi peran tokoh-tokoh agama (alim ulama)
 - b. Peningkatan pendidikan kesadaran hubungan antar umat beragama.
 - c. Peningkatan fungsi organisasi keagamaan

B. Agenda mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (Good Goverment) dan pemerintahan yang bersih (good governance);

1. Peningkatan peran aparatur daerah yg bersih, berwibawa dan profesional, yang berorientasi pada pelayanan masyarakat melalui:
 - a. Peningkatan pembinaan personil/ kepegawaian;
-

- b. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan melalui pendidikan kedinasan;
 - c. Penerapan secara maksimal sistem informasi kepegawaian; dan
 - d. Penerapan *reward* dan *punishment* secara proporsional
2. Peningkatan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel melalui:
- a. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur dan standar pelayanan minimal;
 - b. Peningkatan sistem perencanaan dan penganggaran yg partisipatif;
 - c. Peningkatan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Peningkatan sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah;
 - e. Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi
 - f. Penyiapan data base potensi daerah pada masing-masing sektor
- 3.. Peningkatan PAD melalui:
- a. Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan;
 - b. Peningkatan manajemen pelayanan dan sistem akuntansi pengelolaan pendapatan daerah;
 - c. Peningkatan pelayanan masyarakat, kualitas Perda dan sistem pelayanan perizinan melalui:
-

- Peningkatan kemampuan penyusunan Perda;
 - Peningkatan perizinan daerah melalui sistem satu pintu.
 - Peningkatan upaya penegakan Perda
 - Pembuatan KTP. KK, Akte Kelahiran gratis
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, pelaksanaan dan pengawasan melalui:
- a. Peningkatan akses masyarakat pada informasi kegiatan dan kebijakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat ; serta
 - b. Peningkatan dialog interaktif, curah pendapat dan pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik.
5. Peningkatan peran Aparatur Pemerintahan
- a. Pemberian tunjangan kinerja PNS diantaranya : Insentif, Lauk-Pauk, tunjangan penghasilan, dan lain-lain.
 - b. Pemberian tunjangan untuk kepala dan perangkat desa, BPD, LKMD.
 - c. Pengadaan Tunjangan bagi ketua RT/RW,

C. Agenda mewujudkan Peningkatan Sumber daya Manusia yang unggul di birokrasi maupun di masyarakat;

- 1. Peningkatan kapasitas aparatur birokrasi
 - a. Pelatihan jenjang kepemimpinan
 - b. Pelatihan profesionalitas kerja bidang keahlian
 - c. Pelatihan sistem manajemen keuangan daerah
 - 2. Peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan.
 - a. Peningkatan strata pendidikan
-

- b. Bantuan pendidikan bagi staf atau pegawai untuk jenjang s1, s2 dan s3.
3. Peningkatan kapasitas birokrasi dan masyarakat.
- a. Memberikan bantuan pendidikan melalui beasiswa daerah bagi masyarakat kurang mampu.
 - b. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi untuk memfasilitasi bantuan pendidikan bagi lulusan SMA melalui program 3 T (tertinggal, terisolir dan terbelakang).
 - c. Peningkatan pendidikan birokrasi dan masyarakat berbasis revolusi mental.
4. Program pelatihan masyarakat tani dan nelayan dan pelaku usaha lainnya.
- a. Mengikutsertakan pelatihan atau bimtek, magang di daerah lain tentang usaha pertanian dan nelayan.
 - b. Melatih mengikut sertakan masyarakat dalam pelatihan-pelatihan atau bimtek kerajinan dan industri kecil.

D. Agenda mewujudkan peningkatan Perekonomian, penuntasan Kemiskinan, peningkatan layanan Pendidikan dan pelayanan Kesehatan prima.

1. Peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan melalui
- a. pemenuhan kebutuhan pokok bagi keluarga miskin, terutama pangan, layanan kesehatan, pendidikan dan tersedianya lapangan pekerjaan untuk pengangguran.
 - b. Percepatan pembangunan pada kawasan perbatasan dan terisolasi, terutama prasarana transportasi, air bersih, lingkungan permukiman yang sehat, ekonomi industri pedesaan dan layanan informasi.
-

- c. Mendorong terciptanya program-program ekonomi kerakyatan
2. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui
 - a. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana pendidikan;
 - b. Peningkatan pendidikan anak usia dini;
 - c. Mewujudkan program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun dan gratis biaya pendidikan;
 - d. Peningkatan mutu pendidikan melalui revolusi mental;
 3. Peningkatan produk dan skala usaha hasil pertanian melalui:
 - a. Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi hasil pertanian;
 - b. Peningkatan akses petani terhadap sumber daya produksi seperti, permodalan, teknologi, informasi, transportasi dan pasar;
 - c. Peningkatan produk unggulan hasil pertanian, seperti jambu mente, coklat, cengkeh dan kelapa.
 - d. Penciptaan keaneka ragaman hasil pertanian dengan mendorong kegiatan penelitian dibidang pertanian dan perikanan secara berkelanjutan untuk menghasilkan varietas baru.
 4. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui :
 - a. Peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan, baik Poskesdes, posyandu, Puskesmas maupun Rumah sakit;
 - b. Peningkatan kesehatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat , peningkatan gizi masyarakat, program Jaminan
-

Kesehatan Nasional melalui BPJS serta jaminan kesehatan daerah.

- c. Peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
 - d. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan;
 - e. Peningkatan upaya pengawasan obat dan makanan;
 - f. Biaya kesehatan gratis.
5. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama dan pendidikan agama melalui:
- a. Peningkatan sarana prasarana tempat ibadah;
 - b. Peningkatan sarana prasara pendidikan agama dan pemberian dana insentif bagi guru (guru ngaji TPA, Madrasah Ibtidayah, Madrasah Tsanawiyah (MTsn), Madrasah Aliyah (MA), dan Pondok Pesantren) tiap 3 bulan sekali;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji dan kegiatan keagamaan
6. Peningkatan kualitas tenaga kerja dan perbaikan iklim ke-naker-an dan daya saing melalui:
- a. Peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja;
 - b. Perluasan kesempatan kerja; Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial;
 - c. Peningkatan keahlian teknis dengan membangun balai latihan kerja daerah dan menyelenggarakan diklat secara intensif serta membangun kerjasama pemda dan perusahaan
-

7. Peningkatan pemberdayaan perempuan, pemuda dan Olah Raga melalui:

- a. Peningkatan kualitas hidup, kesetaraan GENDER melalui peningkatan nyata peran dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan;
- b. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk tindak kekerasan dan eksploitasi;
- c. Peningkatan kehidupan organisasi kepemudaan kegiatan kreatifitas dan keterampilan serta membangun hubungan kerjasama dalam percepatan pembangunan daerah;
- d. Merangkul dan memberdayakan Atlet berprestasi untuk menjadi Pelatih sekaligus pegawai honorer di pemerintah daerah.
- e. Peningkatan, pembinaan, penyediaan sarana prasarana olah raga.

8. Peningkatan IPTEK untuk menunjang pembangunan melalui:

- a. Peningkatan layanan informasi tentang IPTEK, terutama teknologi tepat guna bagi masyarakat pedesaan;
 - b. Peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian, LSM untuk pengembangan sumber daya daerah
 - c. Peningkatan aparatur pemerintah daerah, sehingga dalam menentukan kebijakan daerah atas dasar pertimbangan hasil penelitian/kajian yang bersandar pada knowledge, science & engineering.
 - d. Memberikan beasiswa dan fasilitas bagi mahasiswa dan pelajar cerdas, potensial yang kurang mampu.
-

E. Agenda Mewujudkan tata kelola lingkungan hidup yang baik.

1. Program Pengawasan, pengendalian kerusakan lahan dan hutan.
 - a. Melaksanakan rekonstruksi tabal batas yang jelas antara kawasan hutan suaka margasatwa, hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas, hutan produksi yang dapat diproduksi, dan kawasan budi daya tanaman rakyat.
 - b. Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah lahan kritis.
 - c. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembalakan liar (illegal logging).
 - d. Penyesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah
 2. Pengelolaan keaneka ragaman hayati
 - a. Menyusun kebijakan tentang wilayah konservasi daerah bagi keaneka ragaman hayati yang endemik lokal.
 - b. Melaksanakan promosi kekayaan hutan tentang keaneka ragaman hayati baik tingkat daerah, nasional maupun internasional.
 - c. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai stake holder dalam menjaga keaneka ragaman hayati.
 3. Pengelolaan kuantitas dan kualitas air
 - a. Melakukan inventarisasi terhadap kualitas air sungai yang mempunyai beban pencemaran yang tinggi.
 - b. Melakukan kajian strategis untuk pemanfaatan jasa air sungai, mata air, untuk kebutuhan pembangunan di sektor lainnya.
-

- c. Membangun stasiun klimatologi dan pemantau debit air sungai pada sungai-sungai prioritas di kabupaten buton utara.
 4. Pengelolaan kualitas udara
 - a. Pengujian kualitas udara pada daerah padat penduduk
 - b. dan daerah padat kendaraan bermotor
 5. pengelolaan wilayah, laut, pesisir dan pantai
 - a. membuat zonasi wilayah pesisir pantai buton utara
 - b. budidaya mangrove dan terumbu karang pada wilayah pesisir yang mempunyai kerusakan cukup tinggi
 - c. membangun reklamasi pantai
 6. pengelolaan bencana alam
 - a. menginventarisasi daerah rawan bencana
 - b. sosialisasi daerah rawan bencana
 - c. mitigasi daerah rawan bencana
 7. program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
 - a. kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup.
 - b. Kegiatan pengujian air sungai se kabupaten buton utara
 - c. Kegiatan kordinasi penilaian kota sehat/adipura kota kecil
 - d. Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan
 - e. Kegiatan penguatan lisensi amdal
 8. Program peningkatan dan akses informasi sumber daya alam.
 - a. Kegiatan pembuatan buku laporan status lingkungan hidup daerah
 - b. Kegiatan pembuatan data base lingkungan hidup
-

- c. Kegiatan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis dalam rangka untuk bahan penyusunan RPJM dan tata ruang.



PENUTUP

Di era globalisasi, era otonomi daerah dan Masyarakat ekonomi Asean (MEA) semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi, maka proses pembangunan sangat memerlukan keterlibatan semua pihak untuk berperan aktif, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan.

Dengan senantiasa memohon hidayah dan ridho dari Allah SWT sebagai putra daerah Kabupaten Buton Utara: maka saya akan berbuat terbaik untuk kepentingan Daerah / Masyarakat, saya siap bersama seluruh jajaran aparatur pemerintahan dan masyarakat mewujudkan masa depan Kabupaten Buton Utara yang sejahtera lahir dan batin..

Billahi taufiq walhidayah

wassalam



VISI-MISI

CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA PERIODE 2025-2030

Oleh

Afirudin Mathara – Rahman
(AMAN)



**KABUPATEN BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
2024**



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Agenda pembangunan global, nasional dan regional meliputi 4 pilar yakni Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. Seluruh aspek kehidupan manusia telah terakomodir ke dalam 4 pilar tersebut yang secara rinci dirumuskan menjadi 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau dikenal juga dengan istilah *Sustainable Development Goals* (SDGs). Agenda tersebut akan menjadi acuan penentuan program pembangunan global, nasional dan regional hingga Tahun 2030. Berdasarkan hal ini maka Kabupaten Buton Utara wajib mengikuti agenda pembangunan tersebut.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang harus dicapai Kabupaten Buton Utara adalah: (1) Tanpa Kemiskinan, (2) Tanpa Kelaparan, (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, (4) Pendidikan Berkualitas, (5) Kesetaraan Jender, (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, (7) Energi Bersih dan Terjangkau, (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur, (10) Berkurangnya Kesenjangan, (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, (13) Penanganan Perubahan Iklim, (14) Ekosistem Lautan, (15) Ekosistem Daratan, (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut, maka terdapat 220 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Buton Utara.

Hasil analisis data capaian indikator TPB Kabupaten Buton Utara hingga Tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 220 indikator yang menjadi kewenangannya, maka 90 indikator (41 %) sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS), 64 indikator (29 %) sudah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB), 10 indikator (5 %) belum dilaksanakan (BB) dan 56 indikator (25 %) tidak ada data (NA). Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa capaian TPB Kabupaten Buton Utara masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Sulawesi Tenggara. Beberapa indikator yang secara kasat mata belum optimal adalah tingginya angka kemiskinan (masih > 14 %), rendahnya jangkauan layanan air bersih, kualitas dan kuantitas infrastruktur, layanan kesehatan yang belum optimal, pendidikan yang belum memadai, ketersediaan lapangan kerja (mata pencaharian) yang minim, rendahnya aksesibilitas wilayah, kerusakan lingkungan yang masif, penegakan hukum belum optimal, tingginya angka gizi buruk (*stunting*), tingginya kesenjangan antar wilayah, pelayanan publik belum memadai dan banyak persoalan sosial kemasyarakatan yang cukup menonjol seperti miras, judi dan pencurian. Masalah-masalah tersebut secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan capaian TPB Kabupaten Buton Utara.

Dari segi kuantitas potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia Kabupaten Buton Utara cukup potensial. Dari luas wilayah daratan Kabupaten Buton Utara yakni 192.303 hektar, maka sekitar 82.000 hektar (43 %) merupakan Suaka Margasatwa (kawasan lindung), sekitar 15.000 hektar (8 %) merupakan



kawasan mangrove dan sisanya 95.303 hektar adalah non kawasan lindung. Dari luasan tersebut belum dikurangi dengan sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan mata air dan Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah terbebani izin. Kondisi ini merupakan tantangan sekaligus potensi bagi Kabupaten Buton Utara untuk dimanfaatkan secara optimal.

Pengembangan potensi wilayah darat seperti pertanian, peternakan, perkebunan, industri, energy mikro hidro, perdagangan dan jasa, pertambangan serta pariwisata diharapkan mampu mendorong perkembangan wilayah hingga sejajar bahkan bisa melampaui wilayah-wilayah lainnya. Kabupaten Buton Utara juga mempunyai potensi laut yang sangat besar. Walaupun tidak adanya kewenangan kabupaten di wilayah laut, bukan berarti bahwa laut tidak dapat dimanfaatkan. Pemanfaatan potensi laut sebagai salah satu sumber ekonomi biru (*blue economy*) sangat memungkinkan misalnya perikanan tangkap, perikanan budidaya dan industri maritim juga masih bisa dioptimalkan. Selain itu banyak angkatan kerja dari Kabupaten Buton Utara yang bekerja di berbagai kawasan industri seperti Kawasan Industri Morosi dan Kawasan Industri Morowali. Walaupun belum ada data pasti tentang hal ini, namun diperkirakan sekitar 5.000 orang tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Buton Utara bekerja pada kedua kawasan industri tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka diperlukan upaya konkrit untuk mengoptimalkan seluruh potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dimiliki agar semua potensi tersebut dapat memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat Kabupaten Buton Utara. Pada konteks ini maka diperlukan suatu upaya kreatif, partisipatif dan inovatif yang dikenal dengan model "*Pentahelix*" yakni suatu model pembangunan wilayah dengan melibatkan **pemerintah daerah, akademisi, industri, masyarakat sipil dan media.**

Pembangunan harus benar-benar dapat menghasilkan rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat, melalui kemampuan berpikir dan berkarya oleh masyarakat itu sendiri (kemandirian). Untuk itu maka program pembangunan Kabupaten Buton Utara harus berdasarkan pada kebutuhan hidup masyarakat dalam berbagai dimensi, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencakup 3 pilar utama, yakni: (1) transparansi, (2) akuntabilitas, dan (3) partisipasi. Ketiga pilar utama tersebut, diharapkan dapat mengatasi kesimpangsiuran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Buton Utara yang selama ini telah menimbulkan kerugian kepada masyarakat luas.

Untuk mewujudkan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut maka diperlukan kepemimpinan yang mempunyai komitmen kuat untuk melaksanakan seluruh agenda pembangunan yang menjadi kewenangannya. Kepemimpinan yang kuat akan melahirkan keputusan yang baik yang berpihak pada kepentingan daerah di atas kepentingan pribadi atau golongan. Oleh karena itu maka Afiruddin-Rahman mempunyai kemampuan, kemauan dan komitmen kuat untuk membangun Buton Utara yang lebih baik.



1.2. Tujuan dan Kegunaan

Sebagai Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati, kami diwajibkan untuk menyusun dan memiliki Visi, Misi dan Program Kerja yang jelas dan tepat untuk melaksanakan agenda pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan Visi Misi dan Program Kerja ini adalah untuk memberikan gambaran yang konkrit tentang garis-garis besar agenda pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan (2025-2030). Melalui Visi, Misi dan Program Kerja ini pula, diharapkan masyarakat Buton Utara dapat memahami dan menerima gagasan dan niat baik kami sehingga masyarakat menitipkan kedaulatan mereka kepada kami berdua selaku calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara periode 2025-2030.



BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA

2.1. Letak Geografis

Wilayah Buton Utara secara geografis terletak di bagian Selatan garis khatulistiwa pada garis lintang $4^{\circ}06'$ Lintang Selatan sampai $5^{\circ}15'$ Lintang Selatan dan dari Barat ke Timur $122^{\circ}59'$ Bujur Timur sampai dengan $123^{\circ}15'$ Bujur Timur. Secara resmi Buton Utara terbentuk sebagai kabupaten pada tanggal 2 Januari 2007, melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2007. Di dalam undang-undang tersebut, tercantum Ibu Kota Kabupaten Buton Utara di Buranga di Kecamatan Bonegunu, dengan batas-batas wilayah kabupaten sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Wawonii,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Buton,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Buton dan Kabupaten Muna.

2.2. Administrasi

Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kabupaten Buton Utara memiliki luas daratan yaitu 1.923,03 km² atau 192.303 hektar yang terletak di bagian Utara Pulau Buton. Secara administratif Kabupaten Buton Utara terbagi kedalam 6 Kecamatan (Kulisusu, Kulisusu Barat, Kulisusu Utara, Kambowa, Bonegunu dan Wakorumba Utara), 12 Kelurahan dan 78 Desa dengan pusat pemerintahan berada di Buranga. Luas wilayah administrasi Kecamatan Kulisusu adalah 172,78 km², Kecamatan Kulisusu Barat seluas 370,47 km², Kecamatan Kulisusu Utara dan Kecamatan Wakorumba Utara masing-masing seluas 339,64 km² dan 245,26 km², sementara itu Kecamatan Bonegunu dan Kecamatan Kambowa masing-masing seluas 491,44 km² dan 303,44 km².

2.2. Geomorfologi

Morfologi wilayah daratan Kabupaten Buton Utara, berupa wilayah dataran sampai bergelombang kasar (berbukit). Bentang lahan pada wilayah pesisir (*Coast Area*) sebagian besar berupa dataran yang membentang sejajar dengan garis pantai (*Shore line*). Pada wilayah tertentu seperti wilayah ujung Tanjung Wamorapa, Tanjung Goram dan Solongko nampak tidak memiliki wilayah pesisir.

Berdasarkan ketinggian diatas permukaan laut, hampir setengah (48,26 %) dari seluruh wilayah Kabupaten Buton Utara berada pada ketinggian 100 – 500 meter dpl, disusul wilayah dengan ketinggian 25 – 100 meter dpl (21,16%). Sedangkan wilayah yang memiliki ketinggian antara 0 – 7 meter dpl adalah seluas 13.100 ha (6,81%) dari seluruh luas wilayah Kabupaten Buton Utara. Luas wilayah dengan kelas kemiringan lahan antara 0 – 15%, relatif sama dengan luas wilayah dengan kelas kemiringan lahan diatas 15%.

Dari aspek geologi, pada umumnya wilayah Kabupaten Buton Utara bagian Utara memiliki jenis tanah mediteran, rensiana dan litosol, sedangkan wilayah Buton Utara di bagian selatan terdiri dari tanah podzolik merah dan kuning. Jenis



batuan terdiri dari: (1) kelompok mesozoikum (formasi winto, ogena, rumu dan tobelo); (2) kelompok batuan sedimen kenozoikum (formasi doole, tondo, sampolakosa, wapulaka dan alluvium). Deposit batuan sebagai bahan galian/tambang berupa pasir, kerikil, batu gamping, batu bara, batu kapur, mar-mar dan bitumen padat. Deposit bahan tambang lainnya berupa aspal cair, minyak bumi dan lain-lain. Data kuantitas dan kualitas dari semua bahan tambang tersebut, belum tersedia.

Beberapa sungai di Kabupaten Buton Utara yang cukup besar dan belum mengalami kekeringan pada musim kemarau, antara lain: Sungai Lambale, Sungai Langkumbe, Sungai Kioko, Sungai Bubu, Sungai Lagito, Sungai Lahumoko dan Sungai Kambowa. Sungai-sungai tersebut berpotensi sebagai sumber air untuk irigasi, sumber air baku dan pembangkit listrik (*hidro micro*).

2.3. Kondisi Wilayah Pantai dan Laut Dangkal

Pada areal pantai (*Shore*) Buton Utara, memiliki ragam kenampakan bentang lahan (*Landscape*). Ada wilayah yang memiliki areal pantai dengan topografi yang landai berpasir putih dan/atau berkerikil, yang dikenal dengan istilah gisik (*Beach*). Adapula wilayah pantai yang berlumpur dan berterumbu. Pantai yang landai dan berpasir putih (*Beach*), terbentang pada sebagian wilayah pesisir di Kecamatan Kambowa (Bubu, Lagito, Lahumoko, Latembe), Bonegunu (Kioko), Kulisusu (Membuku, Bonerombo, Lemo), Wakorumba (Kowakowa) dan Kulisusu Utara (Lakansai, Pebaoa). Wilayah yang pantainya bukan gisik adalah seluruh pantai di Kecamatan Kulisusu Barat dan sebagian wilayah pantai di lima kecamatan lainnya. Substrat dasar laut di wilayah dekat pantai (*Shorelace* atau *Inshore*) dan lepas pantai (*Offshore*) terdiri dari pasir, lumpur dan/atau lumpur berpasir. Pada wilayah laut dangkal tersebut, terdapat terumbu/karang dan beranekaragam panorama bawah laut yang indah.

Kabupaten Buton Utara meliputi wilayah perairan laut yang cukup potensial untuk pengembangan usaha perikanan karena memiliki bermacam – macam hasil ikan. Beberapa hasil ikan perairan Laut Kabupaten Buton Utara yang banyak ditangkap oleh nelayan didaerah ini adalah: cakalang, teri, kembung, ikan putih, kerapu, bronang, kakap, sunu, tuna, tengiri, barakuda dan nener. Hasil tangkapan lainnya terdiri dari beberapa jenis udang, kepiting, cumi-cumi, gurita, kerang dan teripang. Data hasil tangkapan nelayan, termasuk jumlah nelayannya sendiri, belum tersedia secara lengkap. Demikian pula hasil budidaya perairan laut seperti rumput laut dan beberapa jenis ikan demersal, terutama di wilayah perairan teluk (Kulisusu, Bone dan Kulisusu Utara).

2.4. Iklim

Masyarakat di Kabupaten Buton Utara mengenal musim Barat dan musim Timur. Ciri khas musim Timur, ditandai oleh adanya gelombang laut yang tinggi (sekitar 3 m atau lebih), berlangsung pada bulan Mei - September. Sedangkan pada musim Barat di kenal sebagai musim teduh (tidak ada gelombang laut yang tinggi), berlangsung pada bulan November - April. Suhu rata – rata antara 25°C – 27°C.



Musim hujan terjadi antara bulan November dan Juni. Sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan Juli dan bulan Oktober. Khusus pada bulan April di Kabupaten Buton Utara seperti halnya daerah Sulawesi Tenggara pada umumnya angin bertiup dengan arah yang tidak menentu, yang berakibat pada curah hujan yang tidak menentu pula dan keadaan ini dikenal dengan musim pancaroba. Berdasarkan klasifikasi Schmid dan Ferguson, tipe iklim Wilayah Buton Utara tergolong tipe D. Sedangkan berdasarkan klasifikasi Oldemen, tipe iklim Wilayah Buton Utara tergolong tipe E₂. Konsekuensi dari tipe iklim tersebut maka dalam pembangunan sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan) memerlukan perencanaan yang tepat.

2.5. Pemerintahan

Berdasarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007, tentang pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Muna, maka pembagian wilayah administrasi Kabupaten Buton Utara meliputi 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Bonegunu, Kambowa, Wakorumba Utara, Kulisusu, Kulisusu Barat dan Kulisusu Utara. Dari 6 kecamatan tersebut, selanjutnya terbagi 12 Kelurahan dan 78 Desa.

2.6. Kependudukan

Data Badan Pusat Statistik Tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Buton Utara Tahun 2023 berjumlah **68.954** Jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 35.173 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 33.781 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk rata-rata Kabupaten Buton Utara Tahun 2020-2023 adalah 1,09 % per tahun dengan tingkat penyebaran bervariasi menurut kecamatan dan kepadatan penduduk rata-rata sebesar 38 jiwa/km². Lebih lanjut dijelaskan bahwa Kecamatan Kulisusu mempunyai nilai persentase penduduk tertinggi yakni 39,49 % dari total penduduk Kabupaten Buton Utara Tahun 2023, sedangkan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Wakorumba Utara dengan nilai rata-rata sebesar 35,46 jiwa/km². Rasio jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan tertinggi adalah Kecamatan Bonegunu dengan nilai 105 % yang berarti bahwa setiap 100 orang perempuan terdapat 105 orang laki-laki.

Jumlah penduduk usia > 15 tahun menurut jenis pekerjaan dan jenis kelamin adalah 48.850 jiwa yang terdiri dari 39.545 jiwa angkatan kerja dan 9.305 bukan angkatan kerja. Dari data angkatan kerja tersebut, maka terdapat 38.780 jiwa (21.876 laki-laki dan 16.904 perempuan) yang bekerja dan 765 jiwa pengangguran terbuka (358 jiwa laki-laki dan 407 perempuan). Selanjutnya dijelaskan bahwa dari jumlah yang bukan merupakan angkatan kerja, maka 3.048 jiwa (1.500 jiwa laki-laki dan 1.548 jiwa perempuan) bersekolah, 5.367 jiwa (566 jiwa laki-laki dan 4.801 jiwa perempuan) mengurus rumah tangga dan 890 jiwa (617 jiwa laki-laki dan 273 jiwa perempuan) lainnya. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Buton Utara pada Tahun 2025 adalah 75.729 jiwa dan pada



Tahun 2030 akan berjumlah 84.655 jiwa dan akan terus meningkat, diprediksi pada Tahun 2045 menjadi 111.433 jiwa.

2.7. Pendidikan

Jumlah sekolah tingkat Taman Kanak-kanak Tahun 2023 di Kabupaten Buton Utara adalah 106 sekolah dengan jumlah guru dan murid masing-masing sebanyak 343 orang guru dan 3.150 orang. Untuk tingkat pendidikan SD sebanyak 79 sekolah SD dengan jumlah guru dan murid masing-masing sebanyak 754 orang guru dan 8.271 orang murid, sementara itu jumlah sekolah SMP adalah 35 sekolah dan jumlah guru sebanyak 451 orang serta jumlah muridnya mencapai 3.884 orang murid. Jumlah SM di Kabupaten Buton Utara Tahun 2023 adalah 11 sekolah SMA dengan jumlah guru dan murid masing-masing sebanyak 374 orang guru dan 3/114 orang murid. Untuk sekolah di bawah Kementerian Agama yakni Tsanawiah berjumlah 7 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 81 orang dan murid sebanyak 150 orang, sementara itu jumlah SMK adalah 6 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 166 orang dan murid sebanyak 651 orang. Selanjutnya untuk Madrasah Aliyah berjumlah 5 sekolah dengan jumlah guru dan murid masing-masing sebanyak 59 orang guru dan 202 orang murid.

2.8. Kesehatan

Fasilitas publik untuk kesehatan masyarakat di Wilayah Buton Utara Tahun 2023 terdiri dari 1 unit Rumah Sakit di Kecamatan Kulisusu, 1 unit Poliklinik, juga terdapat di Kecamatan Kulisusu, 12 unit Puskesmas masing-masing kecamatan memiliki 2 Puskesmas, dan sebanyak 79 unit Puskesmas Pembantu (Pustu), sedangkan jumlah Apotek yang terdapat di Kabupaten Buton Utara adalah 13 unit Apotek,

Kabupaten Buton Utara memiliki 47 orang tenaga medis pada Tahun 2023, sementara itu jumlah Perawat 344 orang, Bidan sebanyak 299 orang, Apoteker sebanyak 70 orang, Tenaga Kesehatan Masyarakat 120 orang, Tenaga Kesehatan Lingkungan sebanyak 46 orang dan Tenaga Gizi sebanyak 57 orang.

Jenis-jenis penyakit yang tergolong 10 penyakit terbanyak di Kabupaten Buton Utara adalah ISPA sebanyak 4.294 kasus, Hipertensi sebanyak 3.676 kasus, Gastritis dan Deudentitis sebanyak 2.559 kasus, Demam sebanyak 1.391 kasus, Penyakit Kulit Alergi sebanyak 1.316 kasus, Diabetes Melitus sebanyak 1.062 kasus, Hiperkolesterol sebanyak 936 kasus, Vulnus sebanyak 802 kasus dan Penyakit pada Sistem Otot dan Jaringan Pengikat sebanyak 545 kasus. Jadi secara keseluruhan jumlah kasus 10 jenis penyakit Tahun 2023 di Kabupaten Buton Utara adalah 17.217 kasus.

2.9. Pertanian Dalam Arti Luas

Jumlah rumah tangga petani di Kabupaten Buton Utara Tahun 2023 adalah 9.722 KK sementara itu jumlah petani mencapai 10.095 orang. Jenis tanaman bahan makanan yang diusahakan di Kabupaten Buton Utara terdiri dari padi sawah,



padi ladang, jagung serta berbagai jenis ubi-ubian dan kacang-kacangan. Rata-rata produksi padi sawah sebesar 40,5 kuintal/ha dan rata-rata produksi padi ladang sebesar 24,6 kuintal/ha. Rata-rata produksi jagung sebesar 23,6 kwintal/ha. Rata-rata produksi ubi kayu sebesar 160,1 kuintal/ha dan ubi jalar sebesar 83,4 kuintal/ha, sedangkan produksi rata-rata kacang tanah mencapai 8,8 Kuintal/ha.

Pada tahun 2023, terdapat berbagai jenis tanaman hortikultura yang diproduksi seperti sayuran dan buah-buahan. Produksi tanaman sayuran terbesar di tahun 2023 adalah terung sebesar 623 kuintal. Produksi tanaman buah-buahan yang penting adalah Pisang dengan produksi Tahun 2023 sebanyak 8.369 kuintal, Pepaya sebanyak 678 kuintal, Rambutan sebanyak 1.166 kuintal dan Jeruk Siam sebanyak 782 kuintal. Tanaman perkebunan di Kabupaten Buton Utara didominasi oleh produksi Kelapa sebesar 2.986 ton. Sedangkan tanaman lainnya seperti tanaman biofarmaka dan tanaman hias tidak terdapat di Kabupaten Buton Utara. Jenis ternak yang dikembangkan di Kabupaten Buton Utara terdiri dari ternak besar, ternak kecil dan unggas. Jenis ternak besar terdiri dari kerbau dan sapi. Ternak kecil terdiri dari kambing dan babi, sedangkan unggas berupa ayam buras dan itik manila.

Jumlah Rumah Tangga Perikanan di Kabupaten Buton Utara Tahun 2023 adalah 3.254 RT, sementara itu produksi perikanan tangkap mencapai 9.508 ton. Selanjutnya jumlah Tuumah Tangga Perikanan Budidaya pada periode yang sama adalah 484 RT dengan jumlah produksi sebanyak 2.855 ton.

2.10. Industri

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Buton Utara, Jumlah perusahaan industri di tahun 2023 sebanyak 1255 perusahaan industri yang terbagi dalam beberapa tipe badan hukum dengan jumlah masing-masing pada tahun 2023 yaitu persero terbatas sebanyak 4, CV/Firma sebanyak 15, koperasi sebanyak 4, dan perorangan sebanyak 1232 (BPS Kabupaten Buton Utara, 2024).

2.11. Pariwisata

Jumlah rumah makan/restoran di Kabupaten Buton Utara pada tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022. Jumlah rumah makan/restoran tahun 2023 yaitu sebanyak 93 rumah makan. Dari jumlah tersebut, maka Kecamatan Bonegunu terdapat 16 Rumah Makan, Kambowa sebanyak 2 Rumah Makan, Wakorumba Utara sebanyak 30 Rumah Makan, Kulisusu terdapat 40 Rumah Makan dan hanya 5 Rumah Makan di Kecamatan Kulisusu Barat.

Obyek wisata di Kabupaten Buton Utara meliputi wisata alam dan wisata budaya. Wisata alam antara lain Pantai Membuku, Air Terjun Lakansai, Wisata Mangrove, Wisata Laut, Pantai Bone dan lain-lain. Wisata Budaya antara lain Keraton/Rumah Adat Lipu, Bangkudu, Pesta Panen dan sebagainya.



2.12. Transportasi dan Komunikasi

Pada tahun 2023 tercatat panjang jalan di Kabupaten Buton Utara yang tergolong jalan provinsi sepanjang 113,51 km dan jalan Kabupaten sepanjang 543,14. Dari total panjang jalan yang ada, jalan yang telah di aspal sepanjang 208,09 km dan yang tidak diaspal sepanjang 335,64 km. Panjang jalan menurut jenis permukaan di Kabupaten Buton Utara adalah permukaan aspal sepanjang 208,09 km dan jalan tidak diaspal sepanjang 335,04 km, sementara itu panjang jalan menurut kondisi jalan adalah kondisi baik sepanjang 131,34 km, kondisi sedang sepanjang 107,08 km, kondisi rusak sepanjang 108,68 km dan kondisi rusak berat sepanjang 196,04 km (BPS Kabupaten Buton Utara, 2024).

Jaringan komunikasi di Kabupaten Buton Utara masih menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah tersebut. Wilayah ini sudah ada beberapa tower telepon seluler seperti di Kulisusu, Kulisusu Utara, Wakorumba Utara, Kulisusu Barat dan Bonegunu. Kabupaten Buton Utara hanya memiliki 1 unit Kantor Pos Pembantu yang terdapat di Kecamatan Kulisusu.

2.13. Perbankan dan Koperasi

Saat ini aktivitas perbankan sudah ada di Kabupaten Buton Utara khususnya di Kecamatan Kulisusu. Bank Rakyat Indonesia, Bank Sultra dan BPR Buton Utara. Transaksi perbankan setiap saat dapat dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan banyak BRI Link yang tersebar yang tersebar hampir di seluruh kecamatan.

Pada Tahun 2023, jumlah koperasi aktif di Kabupaten Buton Utara sebanyak 51 koperasi yang tersebar pada 6 kecamatan. Koperasi terbanyak terdapat pada Kecamatan Kulisusu sebanyak 25 koperasi yang terbagi dalam beberapa jenis koperasi yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Unit Desa (KUD), dan lainnya. Koperasi dengan jenis KSP sebanyak 36, koperasi jenis KSU sebanyak 8, dan lainnya sebanyak 7 koperasi. Koperasi jenis KUD tidak terdapat di Kabupaten Buton Utara..

2.14. Pengeluaran Penduduk

Pengeluaran per kapita sebulan untuk Kabupaten Buton Utara dibedakan menjadi komoditas makanan dan non makanan. Pada tahun 2023, Rata-rata pengeluaran makanan per kapita adalah 470.624 rupiah sedangkan non makan adalah sebesar 911.090. Pengeluaran terbesar komoditas makanan per kapita sebulan berasal dari komoditas makanan dan minuman jadi, padi-padian, ikan/udang/cumi/kerang dengan persentase masing-masing sebesar 11,15%, 10,56%, dan 7,81% dari total komoditas makanan untuk tahun 2023.

Pengeluaran terbesar komoditas non makanan per kapita dalam sebulan berasal dari komoditas perumahan dan fasilitas rumah tangga; aneka barang dan jasa; dan pajak, pungutan, dan asuransi dengan persentase masing-masing 25,18%, 10,26%, dan 4,94% dari total komoditas makanan dan non makanan untuk tahun 2023.



2.15. Perdagangan

Kegiatan perdagangan merupakan sektor ekonomi dengan pangsa yang relatif besar. Perannya yang sangat penting dan strategis dalam proses pendistribusian produk dari produsen ke konsumen akhir, menjadikan kegiatan ini sangat penting dalam mata rantai ekonomi. Pada tahun 2023, di Kabupaten Buton Utara terdapat 4 jenis sarana perdagangan yaitu pasar, toko, kios, dan warung. Kios merupakan sarana terbanyak di Kabupaten Buton Utara pada tahun 2023 yaitu 1.342 unit.

2.16. Produk Domestik Regional Bruto

Struktur perekonomian sebagian besar masyarakat di Kabupaten Buton Utara masih didominasi sektor primer yang sangat bergantung pada alam. Kayanya potensi alam yang diberdayakan oleh masyarakat terlihat dari tingginya persentase PDRB pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sumbangan terbesar kedua dihasilkan dari sektor Konstruksi, kemudian Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Pertambangan dan Penggalian; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, sementara peran sektor lainnya masih di bawah 5 persen.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Buton Utara Tahun 2023 atas dasar harga konstan selama 5 tahun terakhir cukup fluktuatif. Total PDRB Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 adalah 3.130,90 Miliar Rupiah, meningkat menjadi 3.211,99 Miliar Rupiah pada Tahun 2020 dan 3.420,72 Miliar Rupiah pada Tahun 2021, sementara itu Tahun 2022 dan Tahun 2023 masing-masing sebesar 3.801,58 Miliar Rupiah dan 4.049,26 Miliar Rupiah. Hingga saat ini proporsi PDRB tertinggi adalah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yakni rata-rata 38 % dari total PDRB Kabupaten Buton Utara, disusul sektor Konstruksi sebesar 16,85 % dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,06 % dari total PDRB Kabupaten Buton Utara.



BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM KERJA

3.1. Visi

Visi pembangunan Buton Utara Tahun 2025-2030 adalah: **“Terwujudnya Buton Utara yang AMAN (Amanah, Maju, Adil dan Nyaman) dan Sejahtera Berlandaskan Nilai Sosial Budaya Masyarakat”**.

3.2. Misi

Untuk merealisasikan visi pembangunan tersebut di atas, maka ditetapkan 6 (enam) misi (agenda utama), yakni:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
2. Menciptakan lapangan kerja berbasis potensi ekonomi unggulan daerah (pertanian, perikanan dan pariwisata).
3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui reposisi dan revitalisasi peran Perusahaan Daerah (Perusda) serta Hilirisasi Sektor Pertanian dan Perikanan.
4. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah yang memadai dan merata.
5. Mewujudkan pembangunan bidang sosial budaya.
6. Mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan lestari.

Strategi dan Pendekatan

Dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Buton Utara selama 5 tahun ke depan, maka strategi dan pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan berbasis sumberdaya manusia (*human resource based development*). Pembangunan yang difokuskan pada sumberdaya manusia lokal sesuai dengan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Prinsip dasar pembangunan yang bertumpu pada sumberdaya manusia adalah: (a) Produktivitas (*productivity*); masyarakat harus mampu meningkatkan produktivitas kerja melalui berbagai kesempatan dan fasilitasi pemerintah daerah; (b) Pemerataan (*equity*); masyarakat harus mendapatkan akses yang seluas-luasnya secara adil untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya; (c) Kestinambungan (*sustainability*); masyarakat harus dapat mengakses informasi, lapangan kerja untuk masa sekarang dan masa yang akan datang; dan (d) Pemberdayaan (*empowerment*); pembangunan harus melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.
2. Pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi (*economic growth based development*); Pembangunan didasarkan pada pengembangan potensi ekonomi wilayah dengan target pertumbuhan ekonomi yang terukur. Untuk mendukung



hal ini maka pengembangan ekonomi akan diarahkan pada pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara merata.

3. Pembangunan berbasis kelestarian lingkungan (*sustainable development*); Pembangunan berbasis kelestarian lingkungan diarahkan untuk pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan secara lestari dan berkelanjutan.

Program Pokok

Agenda Utama (Misi) I: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) minimal mencakup syarat-syarat partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka program yang akan dilakukan adalah:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan organisasi perangkat daerah (OPD).
2. Penerapan sistem pengambilan keputusan berbasis partisipasi pemangku kepentingan secara transparan dan akuntabel.
3. Pengembangan kelembagaan baru untuk mengoptimalkan pelayanan publik seperti Unit Reaksi Cepat, Unit Tanggap Darurat dan Unit Layanan 24 Jam.
4. Program pencegahan KKN birokrasi pemerintah daerah melalui penerapan sistem meritokrasi yang baik.
5. Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan publik yang adil dan merata melalui program "*mobile government*" untuk mencapai tujuan pelayanan Cepat, Tepat, dan Tuntas.
6. Penyesuaian besaran tunjangan berbasis kinerja (Tukin) ASN guna mendorong kinerja pelayanan public.
7. Pengembangan sistem informasi elektronik rencana pembangunan, implementasi pembangunan dan capainnya serta data base daerah melalui sistem online (*E-Goverment*).

Agenda Utama (Misi) II: Menciptakan lapangan kerja berbasis potensi ekonomi unggulan (pertanian, perikanan dan pariwisata). Program penciptaan lapangan kerja untuk masyarakat Buton Utara didasarkan pada sektor-sektor unggulan wilayah yakni : sektor pertanian, perikanan dan pariwisata. Program pembangunan yang masuk di dalam agenda tersebut adalah:

1. Pengembangan pertanian tanaman pangan (padi dan palawija), perkebunan (kelapa, kakao, jambu mete, cengkeh) dan hortikultura (sayur-sayuran dan buah-buahan).
2. Mendorong pengembangan dan revitalisasi Daerah Irigasi (DI) dan pencetakan sawah sesuai potensi wilayah.
3. Pengembangan peternakan (ternak besar: sapi dan kambing; unggas: ayam buras dan ayam ras).
4. Pengembangan perikanan tangkap (tuna, cakalang, ikan campuran, udang, kepiting bakau dan kepiting rajungan) berwawasan lingkungan.



5. Pengembangan perikanan budidaya (tambak udang, tambak kepiting, karamba lobster, karamba kerapu dan rumput laut).
6. Pembangunan fasilitas hatchery untuk menjaga stok alam dan *restocking* kepiting bakau dan kepiting rajungan.
7. Pengembangan pariwisata alam (terumbu karang, laut, pantai indah, pemandangan indah, mangrove, hutan, anoa, dan maleo).
8. Pengembangan pariwisata budaya (situs sejarah, kampung budaya, budaya unik, dan pesta budaya).
9. Promosi wisata alam dan wisata budaya untuk mewujudkan BUTUR TUJUAN WISATA NASIONAL DAN DUNIA.

Agenda Utama (Misi) III: Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui reposisi dan revitalisasi peran Perusahaan Daerah (Perusda) serta Hilirisasi sektor pertanian dan perikanan. Program unggulan peningkatan PAD Kabupaten Buton Utara:

1. Pembangunan industri pengolahan minyak kelapa dan produk-produk ikutannya (nata decoco, briket tempurung, sabun, batang, lidi).
2. Pembangunan dan pengoperasian fasilitas pergudangan produk-produk pertanian tahan simpan (cengkeh, minyak kelapa, telur, beras).
3. Pembangunan industri rumput laut menghasilkan produk setengah jadi (karagenan).
4. Pembangunan industry pengolahan hasil hutan yang bersumber dari tanah milik.
5. Pengembangan Tambak Udang Intensif Perusda.
6. Pengembangan industri olahan hasil perikanan.
7. Pengadaan dan pengelolaan listrik daerah.

Agenda Utama (Misi) IV : Mewujudkan dan Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah yang memadai dan merata. Pembangunan infrastruktur wilayah dilakukan melalui pendekatan: (a) kajian dan studi secara terpadu dengan melibatkan seluruh pihak terkait, dan (b) pembangunan berbasis potensi ekonomi wilayah. Berdasarkan kedua pendekatan tersebut, maka infrastruktur wilayah diuraikan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur ekonomi wilayah yang memadai dan merata, mencakup:
 - Jalan raya (Khususnya kewenangan kabupaten, sementara kewenangan provinsi dan pusat akan dilakukan melalui peningkatan loby dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat)
 - Pelabuhan
 - Terminal (terminal angkutan kota, terminal barang, terminal komoditas)
 - Jalan desa dan jalan usahatani serta jalan wisata
 - Tempat pendaratan ikan (TPI), pabrik es dan “cold storage”
 - Pusat bisnis perkotaan dan perdesaan



2. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang memadai dan merata, meliputi : jaringan air bersih, listrik, telekomunikasi (Internet Gratis), jaringan persampahan dan IPAL.
3. Infrastruktur bidang sosial, meliputi:
 - Rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur pendidikan dasar dan menengah pertama yang layak dan memadai.
 - Pembangunan poliklinik desa (Polindes), Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe C.
 - Pembangunan prasarana rekreasi/wisata (wisata bahari, wisata budaya, wisata air terjun, wisata mangrove dan agro wisata).
 - Pembangunan prasarana keagamaan, mencakup: pembangunan masjid raya, masjid kecamatan, mesjid/mushollah desa, dan Taman Baca Al-Qur'an (TPA) dan fasilitas keagamaan lainnya.
4. Infrastruktur bidang kesehatan lingkungan, meliputi:
 - Prasarana dan sarana tempat pembuangan sampah sementara (TPS)
 - Prasarana dan sarana tempat pembuangan sampah akhir (TPA) terpadu
 - Instalasi pembuangan limbah domestik (rumah tangga) dan limbah kota
5. Infrastruktur Publik, meliputi:
 - Ruang terbuka hijau (RTH)
 - Alun-alun kota
 - Taman bermain anak
 - Kawasan pugasera

Agenda Utama (Misi) V: Mewujudkan pembangunan bidang sosial dan budaya.

Program yang berkaitan dengan pembangunan bidang sosial dan budaya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) di bidang sosial dan budaya, meliputi:

Pembangunan Bidang Sosial

1. **Pendidikan:** Kebijakan dan program bidang pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menurunkan angka putus sekolah akibat kemiskinan dan akses yang rendah, meningkatkan kualitas tenaga kependidikan dan non kependidikan dan peningkatan fasilitas penunjang pendidikan. Program-program tersebut selalu diawali dengan kajian dan studi tentang status pendidikan, analisis kebutuhan ketenagaan dan fasilitas penunjang, mencakup:

a. Pendidikan Dasar dan Menengah

- Realisasi anggaran pendidikan minimal 20 % dari APBD Kabupaten Buton Utara.
- Menyelenggarakan pendidikan gratis mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah.
- Pengadaan bantuan fasilitas penunjang pendidikan mencakup perpustakaan, laboratorium, komputer dan internet sekolah (hot spot).
- Peningkatan kapasitas tenaga kependidikan dan non kependidikan melalui pelatihan, studi banding dan beasiswa S1, dan S2.



- Pemberian insentif berupa tunjangan fungsional daerah bagi tenaga kependidikan dan tunjangan struktural daerah bagi tenaga non kependidikan.
- Pemberian sarana penunjang operasional bagi kepala sekolah dan kepala tata usaha sekolah berupa kendaraan roda dua dan rumah dinas.
- Pembangunan rumah dinas guru bagi tenaga kependidikan dan tenaga non kependidikan yang bertugas di desa-desa terpencil
- Memberikan tunjangan khusus bagi tenaga kependidikan dan non kependidikan yang bertugas di desa-desa terpencil.
- Pengembangan kurikulum muatan lokal bagi sekolah umum mulai tingkat dasar sampai tingkat menengah.

b. Pendidikan Tinggi

- Memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang berasal dari Buton Utara melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri di Sulawesi Tenggara.
- Membangun Asrama Mahasiswa Buton Utara di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Pemberian beasiswa yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan daerah melalui program ikatan dinas daerah (S1, S2 dan S3).

d. Pemberantasan Buta Aksara dan Peningkatan Minat Baca Masyarakat

- Program pemberantasan buta aksara melalui kejar paket A, B dan C.
- Peningkatan minat baca masyarakat melalui pengembangan Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Keliling (*mobile library*).
- Pengembangan ketenagaan perpustakaan daerah.

2. **Kesehatan:** Kebijakan dan program bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai. Tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan usia harapan hidup, rendahnya angka kematian, rendahnya angka kematian ibu dan bayi, peningkatan status gizi masyarakat, dan terkendalinya angka kelahiran. Kebijakan dan program tersebut adalah:

- Pengembangan dan penyelenggaraan RSUD Tipe C yang merupakan standar minimal rumah sakit kabupaten. Kebijakan ini diikuti dengan pengadaan tenaga kesehatan sesuai dengan standar kebutuhan Rumah Sakit Tipe C.
- Optimalisasi peran dan fungsi Puskesmas, Pustu dan Polindes melalui penambahan tenaga dan fasilitas sesuai dengan standar kebutuhan yang layak.
- Revitalisasi peran lembaga kesehatan desa seperti Posyandu, klinik KB dan Klinik Gizi.



- Peningkatan pelayanan dan profesionalisme tenaga kesehatan melalui peningkatan kapasitas SDM.
 - Memberikan tunjangan profesi daerah bagi tenaga kesehatan yang bertugas di desa terpencil.
 - Pemberian fasilitas penunjang berupa rumah dinas dan kendaraan dinas bagi Kepala Puskesmas.
 - Peningkatan pelayanan kesehatan prima dengan prinsip “rebut bola”.
 - Pemberian jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) bagi masyarakat miskin melalui pembayaran BPJS.
 - Program penyadaran masyarakat tentang kesehatan lingkungan.
 - Pemberian insentif bagi tenaga medis yang bekerja sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan pemerintah.
 - Pemberian tunjangan khusus bagi dokter ahli yang bertugas di Buton Utara.
3. **Agama:** Kebijakan dan program bidang agama diarahkan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan toleransi antar umat beragama. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka kebijakan dan program yang dilakukan adalah:
- Program “masjid bunyi” seluruh wilayah Kabupaten Buton Utara.
 - Pembangunan prasarana dan sarana ibadah yang memadai dan merata.
 - Pengembangan perpustakaan di rumah-rumah ibadah.
 - Program pembinaan kerohanian bagi remaja dan anak-anak melalui kegiatan ceramah umum dan lomba inavator muda.
 - Program “gerakan jumat taqwa” bagi seluruh aparat mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat kabupaten.
 - Program perayaan hari-hari besar keagamaan secara berkala.
 - Program penyadaran toleransi antar umat beragama secara berkala.
4. **Pemuda dan Olahraga serta Budaya Lokal:**
- Revitalisasi peran dan fungsi organisasi kepemudaan mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat kabupaten.
 - Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi/lembaga kepemudaan mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat kabupaten.
 - Pengembangan partisipasi generasi muda dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dan kegiatan ekonomi.
 - Program peningkatan prestasi olah raga melalui “program pemandu bakat” dan pembinaan generasi muda.
 - Penyelenggaraan kegiatan olah raga massal secara berkala seperti liga sepakbola, dan pekan olah raga.
 - Pemberian insentif berupa jaminan hidup bagi pemuda yang berprestasi olah raga.
 - Pengembangan budaya lokal melalui penelusuran dan promosi budaya.
 - Mengadakan ivent yang berorientasi budaya lokal secara berkala.



Agenda Utama (Misi) VI: Mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan lestari. Kebijakan dan program optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam ditujukan untuk memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam secara lestari dan berkelanjutan. Untuk itu, maka strategi pengembangan kebijakan dan program didasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan yakni pembangunan yang secara ekonomi menguntungkan (*economic profitable*), secara sosial diterima (*socially acceptable*) dan tidak merusak lingkungan (*environmental friendly*). Kebijakan dan program dimaksud selalu didahului dengan penelitian dan kajian yang mencakup eksistensi, potensi dan peluang pengembangannya, mencakup:

1. Sumberdaya Lahan (Tanah)

- Penyusunan data base sumberdaya lahan, mencakup eksistensi, status kepemilikan, pemanfaatan dan pengelolaan.
- Penyusunan regulasi kebijakan pencegahan konversi lahan khususnya lahan produktif.
- Mendorong terwujudnya hak-hak kepemilikan tanah masyarakat dengan sistem “rebut bola” melalui program Layanan Sertifikat Gratis.

2. Sungai (Air)

- Penyusunan data base sungai mencakup eksistensi, masalah, potensi pengembangan (debit, kualitas air) dan eksistensi pemanfaatannya.
- Optimalisasi fungsi ekologi, ekonomi dan fungsi sosial sungai.
- Optimalisasi pemanfaatan sungai sebagai sumber air baku.
- Instrumentasi peralatan pengamat fluktuasi debit sungai melalui pemasangan Automatic Water Level Recorder (AWLR) dan penakar hujan otomatis (*Automatic Rain Gauge*) untuk sungai-sungai utama.
- Pengembangan energi alternatif mikro hydro.
- Pengembangan wisata dan olah raga air berbasis sungai seperti wisata air terjun, arung jeram dan lomba dayung.

3. Hutan

- Penyusunan data base Hutan Mangrove yang menjadi kewenangan kabupaten (kawasan non lindung).
- Mendorong peningkatan tegakan hutan yang berada di luar kawasan guna meningkatkan nilai penerimaan dari perdagangan karbon.
- Penyusunan regulasi yang mengatur tata niaga hasil hutan kayu dari tanah milik.
- Pengembangan hutan kota sebagai paru-paru kota.



5. Lingkungan Hidup

- Pengembangan sumberdaya manusia bidang lingkungan hidup melalui revitalisasi dan reposisi peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
- Pengembangan fasilitas penunjang dan penguatan kelembagaan DLH seperti laboratorium, peralatan pemantau kualitas lingkungan dan fasilitas sistem informasi lingkungan.
- Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) serta Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
- Penyusunan regulasi tentang standar baku mutu lingkungan hidup daerah yang ketat.



BAB IV PENUTUP

Demikian visi dan misi serta program kerja Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Periode 2025-2030, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmatNya untuk seluruh wilayah dan masyarakat Buton Utara

Buranga, 26 Agustus 2024

Calon Bupati

Afrudin Mathara

Calon Wakil Bupati

Bahman

RBZ-H2

KOALISI BERSAMA RAKYAT



Visi Misi dan Program

CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA 2024 - 2029

H. MUH. RUKMAN BASRI ZAKARIAH, SE
HARWIS HARI, S.IP



VISI

BUTON UTARA MAJU, HARMONIS, DAN BERDAYA SAING

MISI

- 1. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN PUBLIK;**
- 2. MEMPERKUAT KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGERAKAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH;**
- 3. MENGEMBANGKAN PENGELOLAAN POTENSI KELAUTAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN;**
- 4. PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM**
- 5. MEMPERKUAT PENYELARASAN KEHIDUPAN YANG HARMONIS DENGAN LINGKUNGAN, ALAM, DAN BUDAYA,;**
- 6. PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL;**
- 7. MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MANDIRI, CERDAS DAN INOVATIF DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DAN MUTU PENDIDIKAN YANG MEMILIKI DAYA SAING;**

MAKNA VISI

MAJU

Buton Utara yang meningkat kualitas hidup masyarakatnya, pemenuhan infrastruktur yang baik, teknologi yang berkembang, dan perekonomian yang kuat. Hasil –hasil Pembangunan dan kesejahteraan didistribusikan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat dan wilayah di Kabupaten Buton Utara, tanpa diskriminasi. Sehingga setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan.;

HARMONIS

Mengandung makna dalam kehidupan berbagai elemen masyarakat yang ada di Buton Utara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi. Harmoni sosial mengimplikasikan adanya toleransi, pengertian, dan kerjasama antar berbagai segmen masyarakat yang mendukung stabilitas dan kedamaian sosial;

BERDAYA SAING

Masyarakat Buton Utara yang mampu berkompetisi dalam berbagai bidang, baik Pendidikan, pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, serta berbagai aspek kehidupan lainnya baik pada level lokal, nasional dan internasional.

Ada tiga kata kunci utama dalam visi tersebut yakni sebagai berikut:

1. **Pembangunan:** Menekankan pada peningkatan infrastruktur, ekonomi berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat. Ini mencakup modernisasi fasilitas publik, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan akses serta kualitas pendidikan di daerah Buton Utara.
2. **Integrasi:** Fokus pada penyatuan kebudayaan lokal dengan pembangunan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat Buton Utara dalam proses pembangunan. Ini meliputi pelestarian dan promosi budaya, serta penguatan identitas lokal melalui pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar nilai-nilai budaya lokal yang ada di Buton Utara bisa terus lestari meski berhadapan dengan gempuran modernisasi.
3. **Keberlanjutan:** Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam Buton Utara yang bertanggung jawab dan memperhatikan pelestarian lingkungan, serta menerapkan prinsip keberlanjutan dalam semua aspek pembangunan. Ini juga mencakup penerapan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Bagaimana pengelolaan lingkungan di Buton Utara tidak hanya berfokus pada pemenuhan ekonomi saja, tetapi ada tanggungjawab sosial di dalamnya.

Dengan demikian, pendekatan holistik dan terintegrasi ini diharapkan tidak hanya mendorong Buton Utara menjadi daerah yang maju dan harmonis, tetapi juga meningkatkan daya saingnya di tingkat regional, nasional dan Internasional.

PENJABARAN MISI

MISI 1: PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN PUBLIK

Peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik memiliki peran krusial dalam menggerakkan pembangunan Kabupaten Buton Utara. Melalui langkah-langkah ini, potensi daerah dapat terbuka lebih luas, memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan kualitas

hidup mereka. Selain itu, dengan infrastruktur yang memadai dan pelayanan publik yang efisien, kesenjangan pembangunan antar wilayah di kabupaten ini dapat dikurangi secara signifikan.

Lebih jauh lagi, upaya ini juga akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memungkinkan partisipasi aktif dari berbagai sektor masyarakat dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik bukan hanya menjadi suatu kebutuhan, tetapi juga merupakan kunci untuk menciptakan transformasi positif bagi Kabupaten Buton Utara secara keseluruhan. Beberapa hal yang menjadi sasaran dari misi ini antara lain:

- Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, transportasi, dan layanan kesehatan yang menyeluruh di Buton Utara. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, transportasi, air minum dan layanan kesehatan di Buton Utara adalah langkah penting untuk memajukan daerah kita. Dengan memperbaiki jaringan jalan dan transportasi, aksesibilitas antar wilayah dalam kabupaten akan meningkat secara signifikan, memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses pasar, tempat kerja, dan layanan penting lainnya. Selain itu, perbaikan layanan kesehatan yang menyeluruh akan meningkatkan kualitas hidup penduduk dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap perawatan medis dan pengobatan. Hal ini juga dapat membantu mengurangi angka kematian yang disebabkan oleh penyakit yang mungkin sebenarnya masih dapat diobati jika ada akses yang memadai terhadap fasilitas kesehatan. Dengan demikian, melalui peningkatan infrastruktur dasar ini, Kabupaten Buton Utara dapat melangkah menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif, dimana setiap warga dapat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang meningkat.
- Mendorong modernisasi fasilitas pendidikan dan meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas bagi generasi Buton Utara. Langkah

ini merupakan langkah penting dalam memajukan wilayah ini secara holistik. Dengan meningkatnya kualitas fasilitas pendidikan, seperti sekolah yang dilengkapi dengan teknologi modern dan sarana pembelajaran yang memadai, generasi muda akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan zaman. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan taraf pendidikan mereka secara keseluruhan, tetapi juga membuka peluang untuk mereka berkontribusi secara lebih signifikan dalam pembangunan daerah. Selain itu, dengan meningkatnya akses terhadap pendidikan berkualitas, kesenjangan pendidikan antar wilayah dapat dikurangi, memastikan bahwa setiap anak di Kabupaten Buton Utara memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Dengan demikian, investasi dalam modernisasi fasilitas pendidikan dan peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas tidak hanya merupakan investasi dalam masa depan individu, tetapi juga dalam masa depan keseluruhan Kabupaten Buton Utara.

- Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung kemajuan dan inovasi bagi masyarakat Buton Utara secara keseluruhan. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi merupakan langkah penting dalam mendorong kemajuan dan inovasi bagi masyarakat Buton Utara secara menyeluruh. Dengan memperkuat infrastruktur teknologi informasi, seperti penyediaan akses internet yang luas dan cepat, serta pendirian pusat data dan layanan teknologi informasi yang terkini, akan memungkinkan masyarakat Buton Utara untuk terhubung dengan sumber daya informasi global dan mengakses berbagai platform untuk pembelajaran dan kolaborasi. Selain itu, infrastruktur teknologi informasi yang handal akan membuka peluang bagi pengembangan sektor bisnis digital dan industri kreatif di daerah ini, meningkatkan daya saing ekonomi lokal serta menciptakan lapangan kerja baru. Selanjutnya, dengan akses yang mudah terhadap teknologi informasi,

penduduk Buton Utara dapat meningkatkan kualitas layanan publik, seperti pendidikan jarak jauh, layanan kesehatan online, dan administrasi pemerintahan yang efisien. Dengan demikian, pengembangan infrastruktur teknologi informasi bukan hanya akan mempercepat kemajuan ekonomi, tetapi juga akan membuka peluang baru bagi inovasi, pertumbuhan, dan kesejahteraan bagi masyarakat Buton Utara secara keseluruhan.

MISI 2: MEMPERKUAT KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH

Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Disertai Peningkatan Investasi, Pariwisata dan Komoditi Unggulan daerah dengan Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Komoditas Unggulan, Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan UMKM, Berkembangnya Pariwisata Daerah, Mengembangkan Investasi Daerah Dalam Iklim Usaha Kondusif di Buton Utara.

Pembangunan ekonomi Buton Utara adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada selanjutnya membentuk pola kemitraan dengan sektor swasta dengan tujuan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi. Untuk itu diperlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam rangka menjalankan peranannya terhadap fungsi proteksi dan fasilitasi. Peran utama yang dimaksud adalah dukungan kebijakan yang terkait dengan penguatan kelembagaan, regulasi dan fasilitasi dalam mendorong iklim investasi, peningkatan produktivitas dan peningkatan keterampilan masyarakat. Pembangunan ekonomi Buton Utara 5 (lima) tahun ke depan ditujukan kepada pembangunan ekonomi yang berdaya saing. Daya saing dimaksud didefinisikan sebagai kemampuan daerah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dengan mengedepankan potensi sumberdaya sebagai potensi ekonomi

unggulan yang meliputi potensi perikanan kelautan, pertanian dan peternakan, koperasi dan UKM, perdagangan dan industri, sektor jasa serta pengembangan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata. Kunci keberhasilan peningkatan daya saing adalah adanya inovasi yang kreatif yang diwujudkan dengan pengembangan industri yang berbasis kreatifitas atau yang disebut sebagai industri kreatif. Untuk pencapaian tujuan dimaksud membutuhkan dukungan lingkungan yang produktif, perekonomian daerah, ketenagakerjaan dan sumberdaya manusia, infrastruktur pendukung, sumberdaya alam dan lingkungan serta fasilitas kelembagaan keuangan/bantuan permodalan.

MISI 3: MENGEMBANGKAN PENGELOLAAN POTENSI KELAUTAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

Sebagai negara kepulauan terbesar yang terdiri dari lebih dari 17.500 pulau, 108.000km⁸⁰ garis pantai dan tiga perempat wilayahnya berupa laut, laut memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan di Indonesia. Melalui kegiatan ekonomi kelautan termasuk perikanan tangkap dan budidaya, pariwisata laut dan pesisir, pembangunan di sektor kelautan, serta transportasi, Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan dan memanfaatkan potensi sumber daya lautnya. Sebagai negara maritim yang besar, Indonesia sedang mengembangkan implementasi *blue economy*. Istilah blue economy sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Gunter Pauli pada 2010, dimana saat itu ide mendasarnya adalah bagaimana dapat mengatasi isu keberlanjutan yang lebih daripada sekedar konservasi.

Keberlanjutan dalam sektor kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki pilar ekonomi biru yang terdiri dari lima program prioritas, yaitu: 1) perluasan wilayah konservasi, 2) penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan, 3) pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir, dan tawar yang berorientasi ekspor, 4) pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan laut dari kegiatan ekonomi yang merusak, dan 5) pengurangan sampah

plastik di laut melalui gerakan nasional Bulan Cinta Laut.

Sebagai negara kepulauan, membuat sebagian besar bangsa Indonesia tinggal dan menggantungkan hidupnya pada laut, terutama bagi nelayan kecil dan masyarakat pesisir. Sekitar 90% dari 2,5 sampai dengan 3,7 juta nelayan Indonesia yang hidup dari sektor perikanan tangkap merupakan nelayan kecil atau komunitas pesisir yang bergantung secara langsung pada sektor perikanan skala kecil. Banyaknya jumlah nelayan tersebut didorong oleh tingginya keanekaragaman hayati ekosistem laut Indonesia. Sebagai gambaran, laut Indonesia memiliki lebih dari 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies terumbu karang.

Buton utara sangat kaya dengan hasil perikanan, untuk Ikan Tangkap data tahun 2020 menunjukkan hasil ikan tangkap sebesar 6,877 ton yang terdiri atas Ikan Tuna, Cakalang, Tongkol dan Balaki Meskipun dikelilingi oleh sumber daya alam yang melimpah, kenyataannya nelayan kecil dan masyarakat pesisir masih jauh dari sejahtera. Setidaknya 11,34% nelayan di Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan merupakan dua aspek yang saling terkait dan penting untuk pembangunan yang berkualitas di Kabupaten Buton Utara. Melalui program-program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, dan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, penduduk yang terpinggirkan atau rentan dapat diberdayakan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan menjadi agen perubahan dalam komunitasnya. Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan juga perlu diperkuat melalui program-program bantuan sosial, subsidi, dan insentif lainnya yang ditujukan kepada kelompok-kelompok yang berada di bawah garis kemiskinan.

Pelaksanaan UU Nelayan memerlukan konsistensi. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh pemimpin negara dalam

rangka penguatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan masyarakat pesisir. Transparansi dalam pemberian bantuan sangat dibutuhkan, terutama berkaitan dengan jenis bantuan, penerima bantuan sesuai dengan kebutuhan nelayan. Oleh karena itu, peran pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah desa/kelurahan dalam melakukan pendataan terhadap berbagai jenis kebutuhan maupun calon penerima bantuan sangat penting dan strategis. Selain itu, dibutuhkan pula transparansi anggaran yang disediakan, termasuk penyediaan informasi, sehingga masyarakat dapat mengajukan permohonan bantuan kepada kementerian/lembaga terkait. Akses permodalan harus dipermudah dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi nelayan. Persyaratan untuk mendapatkan permodalan harus dipermudah, seperti penghapusan/peringanan persyaratan adanya jaminan pinjaman. Selain itu, skema permodalan harus dibuat lebih fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi pekerjaan nelayan kecil. Perbaikan dapat dilakukan melalui penyesuaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ada di lembaga perbankan nasional.

Dengan memperkuat pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan secara bersamaan, kita dapat memperluas kesempatan ekonomi, sosial, dan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas sosial di seluruh wilayah, tetapi juga menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Misi ini akan dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- *Menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.* Menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan merupakan langkah kunci untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal di Kabupaten Buton Utara. Dengan menyediakan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, para pekerja lokal akan dapat memperoleh keterampilan yang sesuai dengan tuntutan industri saat ini. Hal ini tidak hanya akan

meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, tetapi juga membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah. Dengan demikian, investasi dalam program pelatihan keterampilan merupakan langkah strategis untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil, adaptif, dan siap bersaing dalam pasar kerja yang semakin kompleks dan dinamis.

- *Melanjutkan dan mengefektifkan program bantuan sosial dan ekonomi untuk masyarakat yang kurang mampu.* Pengembangan dan peningkatan efektivitas program bantuan sosial dan ekonomi sangat relevan dengan kondisi kemiskinan yang masih tinggi di Buton Utara. Dengan memperhatikan tingginya tingkat kemiskinan, terutama di kalangan masyarakat yang kurang mampu, pemerintah perlu memprioritaskan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Melalui program bantuan sosial dan ekonomi yang didesain dengan baik, pemerintah dapat memberikan bantuan langsung kepada kelompok-kelompok yang paling membutuhkan, seperti keluarga miskin, lansia, anak-anak yatim, dan difabel. Dengan demikian, program-program ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membantu mengurangi angka kemiskinan kita. Selain itu, dengan meningkatkan efektivitas program-program ini, misalnya dengan memastikan distribusi yang adil dan tepat sasaran, serta memberikan pendampingan dan pelatihan bagi para penerima manfaat, akan membantu membangun fondasi yang lebih kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi disparitas ekonomi yang ada. Dengan demikian, kaitan antara peningkatan program bantuan sosial dan ekonomi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di Buton Utara menjadi sangat penting dalam upaya mencapai pembangunan yang merata di kabupaten kita.
- *Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.* Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah adalah strategi penting untuk mengatasi kondisi

pembangunan yang belum merata di Buton Utara. Dengan melibatkan secara aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pemerintah dapat memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi lokal dipertimbangkan secara tepat dalam penetapan prioritas pembangunan. Hal ini akan membantu memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dialokasikan secara efisien dan berdampak maksimal bagi seluruh masyarakat, terutama yang berada di daerah-daerah yang terpinggirkan. Selain itu, melalui partisipasi langsung dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, masyarakat dapat memainkan peran aktif dalam mengawasi dan memastikan keberhasilan serta keberlanjutan proyek tersebut. Dengan demikian, partisipasi masyarakat bukan hanya menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pembangunan, tetapi juga merupakan sarana yang efektif untuk memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan secara merata dan berkelanjutan, sehingga meminimalkan ketidakmerataan pembangunan yang ada di Buton Utara.

MISI 4: PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mendukung misi ini adalah sebagai berikut:

- *Mengadopsi praktik pembangunan berkelanjutan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan.* Upaya ini merupakan langkah penting dalam upaya melindungi dan melestarikan lingkungan di Buton Utara. Dengan memprioritaskan praktik-praktik yang ramah lingkungan dalam proses pembangunan, seperti pelestarian kawasan hijau dan pengolahan hutan secara ramah lingkungan, kita dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Selain itu, dengan memperhatikan keberlanjutan dalam penggunaan

sumber daya alam, Buton Utara dapat memastikan bahwa potensi alam yang ada dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Dengan demikian, mengadopsi praktik pembangunan berkelanjutan bukan hanya merupakan investasi dalam keberlanjutan lingkungan, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat saat ini dan masa depan di Buton Utara.

- Menggalakkan program edukasi dan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat. Melalui program-program ini, masyarakat diberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan dampak dari perilaku konsumsi yang tidak berkelanjutan. Contohnya, pemerintah setempat dapat mengorganisir kampanye penyuluhan tentang praktik-praktik ramah lingkungan, seperti pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, pengelolaan sampah yang efektif, dan pentingnya konservasi sumber daya alam. Selain itu, sekolah-sekolah dapat mengintegrasikan materi-materi lingkungan dalam kurikulum mereka dan melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti penanaman pohon atau pembersihan pantai untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan siswa. Dengan mendorong kesadaran lingkungan di seluruh lapisan masyarakat, Buton Utara dapat membangun budaya peduli lingkungan yang kuat dan menghasilkan perubahan positif dalam perilaku konsumsi dan interaksi manusia dengan lingkungan.

MISI 5: MEMPERKUAT PENYELARASAN KEHIDUPAN YANG HARMONIS DENGAN LINGKUNGAN, ALAM, DAN BUDAYA,;

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya" adalah mengupayakan agar cara hidup manusia selaras dan tidak bertentangan dengan kondisi lingkungan sekitar, alam, serta nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Buton Utara . Berikut adalah rincian dari masing-masing elemen tersebut:

1. **Lingkungan:** Berusaha untuk hidup dengan cara yang ramah lingkungan, seperti mengurangi polusi, mengelola sampah dengan baik, dan melestarikan sumber daya alam. Tujuannya adalah agar aktivitas

- manusia tidak merusak lingkungan dan dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian ekosistem.
2. **Alam:** Menghargai dan menjaga alam serta keanekaragaman hayati. Ini meliputi upaya pelestarian habitat alami, perlindungan spesies yang terancam punah, dan praktik berkelanjutan dalam penggunaan sumber daya alam.
 3. **Budaya:** Menghormati dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan local di Kabupaten Buton Utara. Ini termasuk mempromosikan dan menjaga warisan budaya serta memastikan bahwa perkembangan sosial dan ekonomi tidak mengabaikan atau merusak identitas budaya yang ada.

Secara keseluruhan, memperkuat penyelarasan ini berarti berusaha untuk mencapai kehidupan yang seimbang, di mana kegiatan manusia tidak hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, alam, dan budaya di sekelilingnya. Dengan demikian, memperkuat penyelarasan ini mencakup usaha komprehensif untuk menciptakan kehidupan yang seimbang dan berkelanjutan, yang menghormati dan memanfaatkan sepenuhnya potensi lingkungan, alam, dan budaya tanpa menimbulkan dampak negatif. Sehingga hubungan dapat berjalan secara harmonis dengan berbagai dimensi, yaitu **Keterhubungan Manusia dan Alam:** Mengakui dan memperkuat hubungan intrinsik antara manusia dan alam, serta bagaimana perubahan dalam satu aspek dapat mempengaruhi aspek lainnya. Ini termasuk memahami bahwa kesejahteraan manusia sangat bergantung pada kesehatan ekosistem dan kualitas lingkungan di sekelilingnya. **Keseimbangan Ekosistem dan Kebudayaan:** Memastikan bahwa interaksi manusia dengan lingkungan dan budaya tidak mengganggu keseimbangan alami atau merusak struktur sosial dan budaya yang ada. Ini berarti mempertimbangkan dampak dari aktivitas manusia terhadap ekosistem serta menjaga keberagaman dan keutuhan budaya lokal. **Penghargaan terhadap Keberagaman:** Menghargai dan merayakan keberagaman ekologis dan budaya. Ini bisa melibatkan usaha untuk melestarikan berbagai spesies dan habitat alami, serta mempromosikan keberagaman budaya melalui pelestarian bahasa, seni, dan tradisi lokal Kabupaten Buton Utara. **Praktik Berbasis Kearifan Lokal:** Mengintegrasikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dalam praktik modern untuk mencapai harmoni yang lebih baik antara manusia dan lingkungan. Ini termasuk menggunakan metode pertanian tradisional yang ramah lingkungan atau prinsip-prinsip desain arsitektur yang sesuai dengan konteks budaya dan ekologis. **Pengembangan Kebijakan dan Regulasi:** Mendorong pembuatan kebijakan dan regulasi yang mendukung keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan serta budaya. Ini berarti merancang undang-undang dan peraturan yang memastikan bahwa pembangunan dan kemajuan dilakukan dengan cara yang tidak merusak lingkungan atau mengancam nilai-nilai budaya. **Pemberdayaan Komunitas:** Melibatkan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan dan perencanaan terkait lingkungan dan budaya. Ini termasuk memberikan kesempatan bagi komunitas untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian budaya, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat

dari upaya tersebut. Serta **Inovasi Berkelanjutan**: Mendorong inovasi yang tidak hanya memajukan teknologi atau ekonomi tetapi juga mematuhi prinsip keberlanjutan dan penghormatan terhadap budaya. Ini bisa termasuk pengembangan teknologi hijau, praktik bisnis berkelanjutan, atau solusi yang mendukung pelestarian budaya.

Dimensi di atas semakin memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis melibatkan berbagai dimensi dan pendekatan untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan antara manusia, lingkungan, dan budaya.

MISI 6: PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL;

Makna penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel mencakup beberapa aspek penting yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, kepercayaan, dan integritas dalam pemerintahan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai kedua konsep utama tersebut:

1. Transparansi:

- a) **Keterbukaan Informasi:** Pemerintah Buton Utara harus membuka akses informasi yang relevan kepada publik. Ini mencakup dokumen, data, dan keputusan yang diambil, sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana keputusan diambil dan bagaimana sumber daya digunakan.
- b) **Proses Pengambilan Keputusan:** Transparansi juga berarti proses pembuatan kebijakan atau keputusan Pemerintah Buton Utara dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Ini termasuk konsultasi publik, pengumuman, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.
- c) **Pengelolaan Anggaran:** Mengungkapkan bagaimana anggaran negara atau daerah dibelanjakan dan memberikan laporan secara berkala tentang penggunaan dana public oleh Pemerintah Buton Utara.

2. Akuntabel

- a) **Pertanggungjawaban:** Pejabat pemerintah Pemerintah Buton Utara harus dapat mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan mereka kepada publik. Jika terjadi kesalahan atau penyalahgunaan wewenang, mereka harus siap untuk menjelaskan dan menerima konsekuensi.
- b) **Sistem Pelaporan dan Pengawasan:** Menerapkan sistem yang memungkinkan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah

Pemerintah Buton Utara dan penggunaan anggaran. Ini bisa melibatkan lembaga pengawas, audit internal, dan laporan kinerja yang dapat diakses oleh publik.

- c) **Penegakan Hukum:** Menjamin bahwa ada mekanisme hukum yang jelas untuk menangani pelanggaran atau korupsi. Ini termasuk memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan adanya sanksi bagi mereka yang terbukti melakukan penyalahgunaan.

Dengan memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, diharapkan pemerintahan dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial, serta membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Dapat memberikan kontribusi positif, Pertama, **Peningkatan Partisipasi Publik:** Transparansi Pemerintah Buton Utara memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses pemerintahan, seperti dalam perumusan kebijakan, perencanaan proyek, dan pengawasan. Partisipasi publik yang lebih besar dapat menghasilkan kebijakan yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, **Peningkatan Kualitas Layanan Publik:** Pemerintah Buton Utara yang transparan dan akuntabel cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat. Dengan adanya mekanisme pelaporan dan umpan balik yang jelas, pemerintah dapat memperbaiki layanan publik dan menyesuaikan kebijakan berdasarkan masukan masyarakat. Ketiga, **Penguatan Demokrasi:** Tata kelola Pemerintah Buton Utara yang baik mendukung prinsip-prinsip demokrasi dengan memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai dengan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban. Ini meningkatkan legitimasi pemerintah di mata publik dan memperkuat sistem demokrasi. Keempat, **Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak:** Akuntabilitas dalam Pemerintah Buton Utara mencakup perlindungan hak-hak warga negara dan penegakan hukum yang adil. Pemerintah yang akuntabel memastikan bahwa hak-hak individu dan kelompok dilindungi dan dilaksanakan sesuai dengan hukum. Kelima, **Pengelolaan Risiko:** Dengan sistem pengawasan dan pelaporan yang baik, Pemerintah Buton Utara dapat lebih mudah mengidentifikasi dan mengelola risiko, termasuk risiko keuangan, operasional, atau reputasi. Ini membantu mencegah krisis dan memastikan ketahanan organisasi. Keenam, **Perbaikan Berkelanjutan:** Tata

kelola yang transparan dan akuntabel mendukung proses evaluasi berkelanjutan. Pemerintah dapat belajar dari kesalahan, menerapkan perbaikan, dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan tantangan yang ada. Ketujuh, **Keberlanjutan Sosial dan Ekonomi**: Dengan mengelola sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab, pemerintah dapat mempromosikan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Ini mencakup perencanaan dan implementasi proyek yang meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Kedelapan, **Kesejahteraan dan Keadilan Sosial**: Pemerintah Buton Utara yang akuntabel memastikan bahwa sumber daya dan manfaat publik didistribusikan secara adil, mengurangi kesenjangan sosial, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Kesembilan, **Peningkatan Hubungan Internasional**: Pemerintah Buton Utara yang menerapkan transparansi dan akuntabilitas secara efektif juga meningkatkan kredibilitas di tingkat internasional. Ini bisa memperkuat hubungan diplomatik, menarik investasi asing, dan mendukung kerjasama internasional.

Dengan menguatkan tata kelola yang transparan dan akuntabel, Pemerintah Buton Utara tidak hanya memperbaiki fungsi internalnya tetapi juga membangun kepercayaan dan hubungan positif dengan masyarakat serta pihak-pihak eksternal. Ini mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan.

MISI 7: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MANDIRI, CERDAS DAN INOVATIF DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DAN MUTU PENDIDIKAN YANG MEMILIKI DAYA SAING;

Makna Mewujudkan masyarakat yang mandiri, cerdas, dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing, mencakup beberapa aspek penting yang bertujuan untuk mengembangkan masyarakat dan sistem pendidikan yang lebih baik dan lebih kompetitif Pada daerah Kabupaten Buton Utara. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai makna tersebut:

1. Masyarakat yang Mandiri:

- a) **Kemandirian Ekonomi:** Masyarakat Buton Utara yang mandiri berarti memiliki kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri secara ekonomi. Ini termasuk kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja, memulai usaha, dan mengelola sumber daya secara efektif.
- b) **Pengembangan Keterampilan dan Kompetensi:** Masyarakat Buton Utara mandiri juga berarti individu dan komunitas memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan, mengatasi masalah, dan mengambil keputusan yang baik secara mandiri.

2. Masyarakat yang Cerdas:

- a) **Pendidikan Berkualitas:** Masyarakat Buton Utara cerdas berarti memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas dan mampu menerapkan pengetahuan dengan baik. Ini mencakup tidak hanya pengetahuan akademis, tetapi juga keterampilan kritis, analitis, dan problem-solving.
- b) **Keterampilan Kognitif:** Individu dalam masyarakat yang cerdas memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan relevan.

3. Masyarakat yang Inovatif:

- a) **Pemikiran Kreatif:** Masyarakat Buton Utara inovatif mampu menghasilkan ide-ide baru dan solusi kreatif untuk berbagai tantangan. Ini termasuk dorongan untuk terus mencari cara baru dan lebih baik dalam melakukan sesuatu.
- b) **Adopsi Teknologi dan Metode Baru:** Masyarakat inovatif juga terbuka terhadap penggunaan teknologi baru dan metode yang lebih efisien dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan dan industri.

4. Meningkatkan Kualitas dan Mutu Pendidikan:

- a) **Kurikulum dan Pengajaran:** Meningkatkan kualitas pendidikan melibatkan pengembangan kurikulum yang relevan, metode

pengajaran yang efektif, dan pelatihan untuk pengajar. Ini memastikan bahwa pendidikan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan terbaru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

- b) **Infrastruktur Pendidikan:** Peningkatan mutu pendidikan juga mencakup perbaikan infrastruktur pendidikan, seperti fasilitas belajar yang memadai, sumber daya pendidikan yang berkualitas, dan akses yang merata bagi semua lapisan masyarakat.

5. **Memiliki Daya Saing:**

- a) **Kesiapan Pasar Kerja:** Masyarakat Buton Utara dan sistem pendidikan yang memiliki daya saing mempersiapkan individu untuk memasuki pasar kerja dengan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan industri dan global.
- b) **Kompetisi Global:** Daya saing juga berarti bahwa pendidikan dan keterampilan yang diperoleh tidak hanya relevan di tingkat lokal tetapi juga kompetitif di tingkat internasional. Ini melibatkan kemampuan untuk bersaing dalam konteks global dan beradaptasi dengan perubahan dan tantangan internasional. Pendidikan dan keterampilan yang diperoleh mempersiapkan individu untuk bersaing di pasar kerja lokal dan global.

Secara keseluruhan, ini berarti kita ingin menciptakan masyarakat Buton Utara yang mandiri, pintar, dan inovatif, serta memastikan pendidikan yang diberikan berkualitas dan mempersiapkan individu untuk bersaing dengan baik.

PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS

1. Bidang Perikanan

- a. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- b. Program Pengembangan Budidaya Perikanan Berkelanjutan

- c. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- d. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
- e. Bantuan budi daya rumput laut,
- f. Bantuan bibit ikan unggul dan bantuan sarana dan prasarana
- g. Menyediakan stasiun pengisian bahan bakar khusus untuk para Nelayan
- h. Pemberdayaan kelompok-kelompok nelayan
- i. Memfasilitasi pembentukan asosiasi nelayan untuk meningkatkan posisi tawar para nelayan.

2. Bidang Pertanian

- a. Mengalokasikan ketersediaan pupuk bagi para petani sesuai dengan luas lahan pertanian
- b. Menjaga stabilisasi harga hasil-hasil pertanian, termasuk saat musim panen (menyediakan wadah untuk menampung hasil-hasil pertanian)
- c. Optimalisasi lahan pertanian sebagai upaya memaksimalkan fungsi bendungan
- d. Menyediakan stasiun pengisian bahan bakar khusus untuk para petani
- e. Memastikan pangan murah melalui stabilisasi harga pangan.

2. Bidang Kesehatan

- a. Ibu Sehat dan Anak Sehat
- b. Program penyuluhan gizi di sekolah-sekolah
- c. Program Gratis Biaya Persalinan bagi yang belum memiliki Asuransi Kesehatan
- d. Program beasiswa dokter spesialis sesuai kebutuhan Rumah Sakit Daerah Buton Utara
- e. Memberikan perhatian kepada kader tenaga kesehatan tradisional yang menjadi mitra Puskesmas di setiap kecamatan
- f. Memaksimalkan fungsi Puskesmas dengan layanan *Puskesmas Keliling*
- g. Menyediakan fasilitas *Ambulance Gratis* di setiap Puskesmas

- h. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan kualitas para tenaga kesehatan di seluruh wilayah Buton Utara
- i. Mewujudkan Kampung Sehat Sejahtera di Setiap Kecamatan
- j. Meningkatkan Akreditasi Klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Buton Utara

3. Bidang Pendidikan

- a. Memaksimalkan perbaikan fasilitas pembelajaran dan rehabilitasi ruang kegiatan belajar
- b. Memberikan seragam gratis untuk anak sekolah dan guru
- c. Menaikkan tunjangan bagi para ASN Buton Utara
- d. Program pemberian makanan bergizi untuk anak sekolah
- e. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yang berprestasi dan para Tahfiz Quran
- f. Fasilitas Pendidikan yang ramah bagi penyandang *disabilitas*
- g. Membangun Desa Literasi Media di setiap Kecamatan
- h. Satu Sekolah satu Internet

4. Bidang Pemerintahan dan Hukum

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien sampai ditingkat desa
- b. Menerapkan sistem *Paperless* guna meminimalkan penggunaan kertas pada bagian pelayanan publik
- c. Melakukan pelayanan administrasi ke wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan (layanan pembuatan KTP dan KK keliling)
- d. Menerapkan sistem *Reward and Punishment* bagi pegawai pemerintahan tanpa pandang bulu demi penegakkan supremasi hukum
- e. Mengikis budaya yang melanggengkan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme
- f. Mengembangkan budaya melayani dengan ikhlas, responsive dan tidak diskriminatif

5. Bidang Ekonomi

- a. Secara Rutin melakukan Operasi Pasar dalam Pemantuan Harga dan Ketercukupan bahan Pokok
- b. Membangun Pusat informasi tentang Informasi harga Pasar, hasil Panen dan informasi peringatan dini cuaca dan wabah
- c. Program *One Village, One Product*. Kita upayakan satu desa bisa menghasilkan satu produk yang bisa menjadi keunggulan tersendiri dibanding desa lainnya
- d. Pemberian bantuan 1000 UMKM pertahun
- e. Revitalisasi Pasar Tradisional

6. Bidang Sosial Budaya

- a. Membangun ruang terbuka hijau sebagai sarana *refreshing* bagi masyarakat Buton Utara di Setiap Kecamatan
- b. Program Tunjangan Bagi Lansia
- c. Bedah Rumah disetiap Desa
- d. Meningkatkan kesejahteraan para pengurus masjid dan pengajar Al-Quran
- e. Memberikan perhatian khusus kepada para tokoh agama dan tokoh adat di seluruh wilayah Buton Utara yang multi etnis
- f. Identifikasi budaya lokal Buton Utara guna menjaga kelestariannya di masa mendatang
- g. Menggelar Festival Nasional untuk Raja-Raja SeNusantara yang berpusat di Buton Utara

7. Bidang Pariwisata

- a. Membangun kembali Kawasan Keraton dan situs budaya
- b. Pengembangan Wisata Maritim Bahari
- c. Promosi Wisata sebagai Kabupaten Benteng

- d. Wisata Magrove sebagai Wilayah kawasan terluas di Asia Tenggara
- e. Mengadakan festival kuliner khas daerah Buton Utara sebagai sarana promosi kebudayaan
- f. Melaksanakan *Festival Fishing Tournament* sebagai Agenda Nasional dan Internasional



PDI PERJUANGAN



PARTAI NasDem
GERAKAN PERUBAHAN



Visi dan Misi

ABDUL SALAM SAHADIA, S.Sos., M.A.P.
(Calon Bupati Buton Utara)

dan

AHMAD AFIF DARVIN, S.H.
(Calon Wakil Bupati Buton Utara)

ANAK MUDA BISA Bangkit Bersama Rakyat



SAFF
SALAM - AFIF

BUTUR
2024 - 2029

Lingkungan Internal

Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Buton Utara sekarang ini adalah :

- Kabupaten Buton Utara Memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah seperti hasil hutan (rotan, madu, kayu olahan); potensi pertambangan aspal dengan deposit 1 Milyar 813 juta Ton atau 39,45 % dari Total Cadangan Aspal Buton; potensi energi panas bumi di sepanjang pantai timur dari Desa Bubu, Kecamatan Kambowa, ke Buranga, Bonegunu dan potensi emas; aliran sungai besar yang berpotensi menjadi pembangkit listrik tenaga air;
- Kabupaten Buton Utara Potensi Perikanan Tangkap dengan luas perairan 2500 km² dengan jumlah rumah tangga perikanan tangkap sebanyak 3323 dengan total produksi 3902,43 ton pertahun berdasarkan data BPS tahun 2021; dan Budidaya tambak, laut dan kolam berdasarkan data BPS tahun 2021 sebanyak 510 buah (ikan, kepiting, udang, rumput laut dan kerang, lobster) dengan luas lebih dari 3000 m² data jurnal UHO;
- Memiliki potensi pariwisata Hutan Mangrove seluas ± 2000 hektar, budaya yang kuat berupa Benteng Lipu Buton Utara, lengkap dengan pakaian adat, tari-tarian dan permainan tradisional yang beragam;
- Memiliki Potensi Pertanian dengan luas areal sawah di atas 700 hektar produktif berdasarkan data BPS tahun 2023 kebun kelapa 5390 ribu hektar, kopi 296 ribu hektar dan kakao 2304 ribu hektar;
- Buton Utara memiliki 2317 orang ASN dan lebih dari ribuan orang PPPK yang memberikan layanan pada 68.960 penduduk di pusat pelayanan medik, sekolah, maupun instansi teknis kira-kira berada pada rasio 1 berbanding 20 orang;
- Dari sisi Kamtibmas Buton Utara memiliki Polres dan Kodim Sendiri yang berkedudukan di Ibu Kota Buton Utara;
- Usia produktif rentang usia 20-44 tahun dari total penduduk 68.954 jiwa pada tahun 2024 berdasarkan data BPS adalah 35,7 persen atau sekitar 24.671 jiwa;
- Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Buton Utara relatif rendah yaitu 1,09 persen dari 1,11 secara Nasional

Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan yang merupakan permasalahan internal Kabupaten Buton Utara sekarang ini adalah :

- Kondisi Perekonomian Masyarakat yang masih rendah yakni 9,09 ribu jiwa (BPS 2024) atau sekitar 13,18 persen masyarakat Buton Utara masih kategori miskin
- Angka partisipasi sekolah berdasarkan data Susenas Tahun 2023 terdapat 0,8 persen perempuan dan 2,03 persen laki-laki yang belum sama sekali bersekolah, dan 19,50 persen laki-laki dan 22,42 persen perempuan di Buton Utara tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan tinggi;
- Belum terjangkauanya akses transportasi dan telekomunikasi di beberapa wilayah Buton Utara;
- Rendahnya pemahaman generasi muda terhadap adat budaya Buton Utara;
- APBD Buton Utara yang masih minim yang hanya berkisar di bawah 1 Triliun dan rendahnya PAD;
- Belum adanya sarana Pendidikan Tinggi di Kabupaten Buton Utara

Terdapat beberapa permasalahan sosial politik yang berimbas pada perpecahan di kalangan masyarakat seperti konflik Ibu Kota, serta pembangunan yang hanya terpusat di satu wilayah

Lingkungan Eksternal

Peluang (*Opportunities*)

Peluang yang perlu dimanfaatkan oleh Kabupaten Buton Utara sekarang ini adalah :

- Buton Utara dengan Letak Geografis di titik Sentrum Sultra dapat menjadi lokasi strategis untuk menjadi pusat ekonomi, pendidikan dan pelayanan kesehatan karena dilalui oleh jalur transportasi yang menghubungkan Sulawesi Tenggara Wilayah Daratan dan Wilayah Kepulauan, yaitu jalur Kapal Kendari ke Wakatobi serta jalur darat Kendari ke Kota Baubau dan sekitarnya;
- Buton Utara berpeluang menjadi sentra produksi pangan karena memiliki luas lahan pertanian dan perikanan yang ideal
- Potensi SDA yang belum dikelola dengan baik memungkinkan untuk diserapnya tenaga kerja dan dapat meningkatkan PAD
- Peluang penggunaan APBN pada wilayah kebijakan tertentu untuk peningkatan sarana Jalan Raya, Sana Prasarana Pendidikan, dan Kesehatan yang selama ini belum Maksimal misalnya Impres Jalan Daerah (IJD), DAK Pendidikan dan Kesehatan, serta DBH yang membutuhkan konektifitas yang kuat dari pimpinan daerah terhadap pemerintah pusat dan provinsi;
- Buton Utara berpeluang menjadi lokasi tujuan wisata alam, dan budaya sehingga dapat mempertemukan dan mengakulturasi etnik dan budaya di Sulawesi Tenggara yang berbeda antara daratan dan kepulauan sehingga dapat mendorong kemajuan ekonomi, pendidikan dan Sosial Budaya di Buton Utara;

Tantangan (*Threath*)

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Buton Utara sekarang ini adalah :

- Kondisi iklim global berupa Badai La Nina yang melanda Indonesia dapat mengganggu peningkatan sumber daya dan produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan di Buton Utara, dan fenomena ini diprediksi akan berlangsung cukup lama;
- Jalur jalan Provinsi yang melewati Wilayah Buton Utara harus menjadi agenda prioritas bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga menghambat mobilisasi barang sehingga mengganggu peningkatan ekonomi masyarakat;
- Perlu tersedianya pasar yang terkoneksi langsung dengan petani dan nelayan sehingga hasil-hasil tani dan perikanan tidak terserap oleh pasar atau dibeli dengan harga murah;
- Perlu tersedianya sentra pengolahan sumber daya alam dalam skala menengah atau besar untuk hasil hutan, pertanian dan perikanan di Buton Utara, sehingga Buton Utara belum menjadi daerah tujuan;

V i s i :

**BERGERAK TIGA KALI LEBIH CEPAT
MEWUJUDKAN BUTON UTARA SEHAT,
CERDAS, MANDIRI, SEJAHTERA DAN
BERMARTABAT**

#BERSAFF_UntukSemua



| | |
|---|--|
|  | 1. Terwujudnya layanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Buton Utara serta tersedianya fasilitas kesehatan yang lengkap, memadai yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat Buton Utara serta meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kesehatan; |
|  | 2. Terselenggaranya biaya Pendidikan gratis dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Buton Utara melalui bantuan belajar dan beasiswa hingga ke jenjang Pendidikan Tinggi; |
|  | 3. Tersedianya Pupuk dan bibit gratis bagi petani, alat tangkap dan sarana budidaya bagi nelayan serta tersedianya permodalan dengan bunga sangat rendah, tersedianya pasar, pendampingan untuk peningkatan kualitas produk serta keberlanjutan usaha bagi UMKM; |
|  | 4. Terbangunnya fasilitas telekomunikasi, jalan, jembatan, pelabuhan, listrik dan air bersih untuk mendukung sarana transportasi laut, baik dalam wilayah maupun keluar Buton Utara dalam rangka mempermudah akses ekonomi; |
|  GOVERNMENT | 5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat |
|  | 6. Memperkuat budaya masyarakat yang saling menghargai, tolong menolong antar sesama, dan berjiwa gotong royong sesuai falsafah 'Lipu Tinadeakono Sara'. |

AKSI MISI SATU



1. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Berupa Rumah Sakit Kabupaten Tipe A untuk wilayah Ibukota dan Rumah Sakit Tipe B untuk wilayah tertentu, Pusat kesehatan Masyarakat (Puskesmas) serta Puskesmas Pembantu (Pustu) secara merata di seluruh Wilayah Buton Utara didukung dengan Alat Kesehatan (Alkes) yang lengkap;
2. Peningkatan insentif untuk tenaga Kesehatan;
3. Tersedianya Mobil dan Kapal Ambulance gratis, Mobil Jenazah (Kereta Merta) serta fasilitas rujukan ke Rumah Sakit di luar Buton Utara;
4. Gratis bagi pasien yang dirujuk pada Fasilitas Kesehatan Khusus untuk semua jenis penyakit.
5. Penyediaan Kendaraan Dinas untuk Kepala Puskesmas, dan Tenaga Kesehatan di Sentra Pelayanan Dasar (Bidan Desa, Tenaga Perawat di Pustu)

AKSI MISI DUA



1. Beasiswa dan Bantuan Belajar bagi seluruh mahasiswa Buton Utara;
2. Pakaian Sekolah Gratis TK, SD, SMP bagi Seluruh Peserta Didik di Buton Utara;
3. Pembangunan sekolah dan sarana pendidikan yang lengkap secara merata di seluruh wilayah Buton Utara;
4. Peningkatan Kualitas Tenaga Guru melalui pelatihan dan pemberian beasiswa khusus guru untuk Magister dan Doktor;
5. Pengadaan Laptop bagi Guru se Kabupaten Buton Utara;
6. Penyediaan kendaraan dinas untuk Kepala Sekolah
7. Pemerintah Daerah akan mendorong terbentuknya Perguruan Tinggi di Kabupaten Buton Utara

AKSI MISI TIGA



1. Tersedianya Pupuk dan bibit gratis bagi petani ;
2. Tersedianya alat tangkap dan sarana budidaya bagi nelayan;
3. Tersedianya permodalan dengan bunga sangat rendah pendampingan untuk peningkatan kualitas produksi serta keberlanjutan usaha bagi UMKM;
4. Stimulasi pasar di daerah-daerah tertentu untuk mempermudah perputaran ekonomi;

AKSI MISI EMPAT



1. Pembanguann fasilitas jalan dengan kualitas terbaik untuk mempermudah akses transportasi;
2. Pembangunan dan perbaikan jembatan untuk mendukung akses jalan di beberapa wilayah Buton Utara;
3. Pembangunan fasilitas pelabuhan berskala besar untuk mendukung sarana transportasi laut dalam rangka mempermudah barang dan jasa masuk ke Buton Utara;
4. Mempercepat membangun BTS untuk memperluas akses telekomunitasi terutama daerah-daerah pesisir dan terpencil.
5. Pembangunan pembangkit dan jaringan listrik di wilayah tertentu yang minim penerangan dan pasokan listrik
6. Penyediaan fasilitas sarana air bersih bagi masyarakat berupa sumur bor terpusat dan sarana perpipaan;

AKSI MISI LIMA



1. Pengadaan Mobil Operasional bagi Camat dan motor Operasional Bagi Kepala Desa;
2. Peningkatan Alokasi Dana Desa secara Bertahap;
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan desa melalui pelatihan, serta pemberian insentif bagi desa berprestasi dan bantuan permodalan bagi BumDES dengan penilaian terbaik;
4. Penyediaan Kendaraan Dinas untuk Kepala Desa dan Lurah;
5. Melaksanakan tata kelola layanan pemerintahan berbasis elektronik;

AKSI MISI ENAM



1. Menghidupkan kembali penguatan karakter bagi Pemuda melalui pembangunan sekretariat Pramuka, KNPI, Karang Taruna dll
2. Meningkatkan prestasi dengan menyelenggarakan kompetisi olahraga melalui KONI Buton Utara secara berjenjang dengan mengedepankan potensi Cabang Olahraga;
3. Menyelenggarakan Festival Budaya yang dipusatkan di Benteng Lipu Kulisusu secara berkala untuk meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan ke Buton Utara;
4. Menghidupkan kembali Lembaga Adat untuk memperkuat khasanah budaya dan ciri khas Buton Utara;
5. Mengadakan kompetisi olahraga tradisional khas Buton Utara secara berjenjang dalam rangka memperkuat kembali nilai-nilai budaya di tengah-tengah masyarakat.
6. Pemberian bantuan untuk pembangunan Sarana Ibadah yang memadai bagi tiap Desa/Kelurahan;
7. Pemberian dan peningkatan insentif untuk kesejahteraan bagi perangkat adat/perangkat rumah ibadah
8. Pemberian bantuan permodalan dan peningkatan keterampilan bagi perempuan kepala keluarga;
9. Pemberian bantuan belajar dan beasiswa khusus kepada anak tanpa orang tua (yatim piatu) hingga selesai kuliah.
10. Pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas/cacat baik berupa alat bantu maupun jaminan hidup.